



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN**

Ikhtisar

Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten merupakan bentuk saah satu bentuk pertanggungjawaban dari kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Berdasarkan dokumen rencana strategis 2023-2026 dan rencana kerja tahun 2023 terdapat 2 sasaran yaitu Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan dengan 4 indikator yaitu 1. Luasan permukiman kumuh, indikator ini dicapai melalui program Kawasan permukiman 2. Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau, indikator ini dicapai melalui program pengembangan perumahan, 3. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU, indikator ini dicapai melalui program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 4. Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan, indikator ini dicapai melalui Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dan Program Penatagunaan Tanah.

Capaiain realisasi untuk indikator Luasan permukiman kumuh sebesar 100% dengan realisasi sebesar 109,42 Ha dari target sebesar 109,42 Ha. Pada tahun 2023 merupakan awal renstra dengan target luasan permukiman kumuh yang akan ditangani sebesar 219 Ha. Pada tahun 2023 Dinas Perkim Provinsi Banten telah melaksanakan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang seluas 2,24 Ha, Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang seluas 14,50 Ha, Desa Banjarmasin Kec. Carita Kab. Pandeglang seluas 10,37 Ha, Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang seluas 12,21 Ha, Desa Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang seluas 11,00 Ha, Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang (Tahap 2) seluas 10,55 Ha, Kelurahan Tembong Kec. Cipocok Jaya Kota Serang seluas 10,09 Ha, Kelurahan Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang seluas 15 Ha, Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan seluas 10,86 Ha, Desa Sukajadi Kec. Carita Kab. Pandeglang seluas 12,60 Ha. Capaian kinerja tahun ini lebih besar dibanding tahun 2022.

Capaian realisasi Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau sebesar 108,66% dengan realisasi sebesar 47,27% dari target sebesar 43,50%. Capaian melebihi 100% dikarenakan target renstra pada tahun 2023 adalah sebanyak 50 unit. Pada tahun 2023 Dinas Perkim Provinsi Banten telah melaksanakan pembangunan rumah bagi korban bencana sebanyak 120 unit dengan realisasi sebanyak 120 unit. Pembangunan rumah korban bencana terdampak tsunami dan gempa bumi di Kabupaten Pandeglang yaitu Kecamatan Carita sebanyak 2 Unit; Kecamatan Sumur sebanyak 20 unit; Kecamatan Cimanggu sebanyak 3 unit; Kecamatan Cigeulis 7 unit; Kecamatan Munjul sebanyak 4 unit; Kecamatan Picung sebanyak 4 unit; Kecamatan Patia sebanyak 2 unit; Kecamatan Cipeucang sebanyak 4 unit; Kecamatan Panimbang sebanyak 4 Unit; kecamatan Pagelaran sebanyak 1 Unit; Kecamatan Sobang sebanyak 1 unit; Kecamatan Cibaliung sebanyak 2 unit; Kecaatan Kadu hejo sebanyak 6 unit; Kecamatan Mekarjaya sebanyak 1 unit; Kecamatan Majasari sebanyak 1 unit, serta pembangunan korban bencana peregrakan tanah yang direlokasi ke Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak sebanyak 56 unit, serta rumah korban bencana angin putting beliung dan banjir bandang di Kecamatan Kasemen, Kota Serang sebanyak 2 unit. selain melaksanakan pembangunan rumah korban bencana, pada perubahan anggaran tahun 2023 Dinas Perkim Provinsi Banten juga telah melaksnakana pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin melalui dana insentif sebanyak 78 unit dengan menggunakan metode RISHA namun dari target 78 unit hanya dapat dibangun sebanyak 20 unit disebabkan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi (kinerja perubahan), adapapun yang telah dibangun yaitu di Kabupaten Pandeglang Kecamatan Kecamatan Warunggunung sebanyak 7 unit; Kecamatan Kalanganyar sebanyak 1 unit; Kecamatan Menes sebanyak 10 unit; Kecamatan Kroncong sebanyak 2 unit.

Capaian realisasi Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 108,57% dengan realisasi 99,59% dari target sebesar 91,73%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini yaitu peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum permukiman dengan realisasi sebanyak 1610 Lokasi dari target sebanyak 1619 Lokasi, terdapat 9 lokasi yang tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya kesalahan lokasi. Dari realisasi sebanyak 1610 Lokasi tersebar di Kabupaten/kota diantaranya Kota Serang sebanyak 131 Lokasi, Kabupaten Serang sebanyak 319 Lokasi, Kabupaten Pandeglang sebanyak

307 Lokasi, Kabupaten Lebak sebanyak 210 Lokasi, Kabupaten Tangerang sebanyak 415 Lokasi, Kota Tangerang Selatan sebanyak 128 Lokasi dan Kota Cilegon sebanyak 6 Lokasi.

Capaian Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan sebesar 100% dengan realisasi 5 Dokumen dari target 5 dokumen. Indikator terkait sub bidang pertanahan yang sudah dilaksanakan adalah penetapan lokasi sedangkan untuk Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dan Program Penatagunaan Tanah hanya melaksanakan rapat internal, secara kinerja belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi, hal ini karena masih menjadi kewenangan Pusat (Kanwil Kementrian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten Kota). Sedangkan penetapan lokasi Sudha dilaksanakan Tol Serbaraja, Tol Tangerang-Merak (Perpanjangan Penlok Thp. II dan III), Tol Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran (Perpanjangan Penlok), KAI (SK. Gub Kerohiman), Tol Serang - Panimbang (Perpanjangan Penlok).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 serta mengakselerasikan dengan rencana pencapaian Tahun 2023-2026.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten di masa yang akan datang, Amin.

Serang 4 Maret 2024

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN



M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
 BAB I Pendahuluan	 1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Maksud dan Tujuan	2
1.3.Dasar Hukum	2
1.4.Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5.Isu – Isu Strategis	18
1.6.Proses Bisnis	20
1.7.Cascading	22
1.8.Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023	23
1.9.Sistematika Laporan	23
 BAB II Perencanaan Kinerja	 26
2.1 Perubahan Rencana Startegis 2023 - 2026	26
2.1.1 Visi dan Misi	27
2.1.2 Strategi	29
2.1.3 Arah Kebijakan	31
2.1.4 Indikator Kinerja	33
2.2 Perubahan Rencana Kerja 2023	34

2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja 2023	63
BAB III Akuntabilitas Kinerja	67
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	67
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	75
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja; tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	76
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja samai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	76
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	79
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	79
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	84
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	95
3.2 Realisasi Anggaran	120
BAB IV Penutup	85
4.1 Kesimpulan	137
4.2 Saran – saran Rekomendasi	138

Lampiran

- 1) SK. Tim SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
- 2) Perjanjian Kinerja Kepala Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
- 3) Matriks Renstra 2023-2026
- 4) SK. Penetapan Indikator Kinerja Utama
- 5) Surat Pernyataan telah di reviu
- 6) BA LHE

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pegawai PNS Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel 1.2	Rekapitulasi Jumlah PNS Menurut Golongan	15
Tabel 1.4	Tindak Lanjut LHE Tahun 2022	21
Tabel 2.1	Tujuan RPD dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026.....	26
Tabel 2.2	Sasaran RPD Tahun 2022 – 2026 dan Renstra Dinas PRKP Tahun 27 2022 – 2026	27
Tabel 2.3	Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 – 2026.....	28
Tabel 2.4	Kebijakan RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 – 2026	29
Tabel 2.5	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026.....	30
Tabel 2.6.	Keterkaitan Antara Sasaran dan Indikator Kinerja.....	32
Tabel 2.7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Perubahan dan Prakiraan Maju Tahun 2024	34
Tabel 2.8	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 Perubahan.....	42
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Ess 2.....	61
Tabel 2.10	Perjanjian Kinerja Ess 3.....	61
Tabel 3.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	65
Tabel 3.2.	Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022	73
Tabel 3.3.	Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022	73
Tabel 3.4	Realisasi kinerja tahun 2022	75
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja tahun 2023	75
Tabel 3.6.	Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkim Provinsi Banten Tahun 2013-2026.....	76

Tabel 3.7	Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya.....	84
Tabel 3.8	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	5
Gambar 1.2	Keterkaitan Proses Bisnis dengan Cascading	18
Gambar 1.3	Keterkaitan Proses Bisnis dengan Struktur Organisasi	18
Gambar 1.4	Proses bisnis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19
Gambar 1.5	Peta Sub Proses Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19
Gambar 1.6	Peta Relasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .	19
Gambar 1.7	Cascading Dinas Perkim.....	20
Gambar 3.1	Rapat pembahasan Raperda RP3KP	94
Gambar 3.2	Rapat Penyusunan Review Dokumen RP3KP	94
Gambar 3.3	Rapat Koordinasi/ Kunjungan Kerja Ke Kalimantan Selatan	95
Gambar 3.4	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman kumuh di Desa Carita Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang .	99
Gambar 3.5	Peningkatan Kualitas Kawasan kumuh di Desa Banjarmasin Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang	101
Gambar 3.6	Hasil Pembangunan Rumah Korban Bencana Terdampak Tsunami dan Gempa Bumi	105
Gambar 3.7	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (WKP I)	111

Gambar 3.8	Rapat Koordinasi Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	112
Gambar 3.9	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (WKP II dan III)	113

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari system perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP).

LKIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam LKIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berkewajiban menyusun LKIP tahun 2023 selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 tahun 2021, LKIP ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagai mana telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, capaian kinerja tahun untuk, capaian

kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah perwujudan dari pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Banten yang dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi Banten. Tujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Memberikan gambaran perihal kinerja Pemerintah Provinsi Banten Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023.
2. Memberikan Pertanggung Jawaban/ Akuntabilitas terhadap penyelenggaraan program pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
21. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2023;
25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.
26. Peraturan Gubernur banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Sunan Organisasi dan tata Kerja;
27. Peraturan Gubernur banten Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diatur sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah; dan (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya diatur bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Kemudian, adapun Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana
 2. Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda.
3. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan :
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
4. Kepala Bidang Permukiman, membawahkan:

1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
5. Kepala Bidang Pertanahan, membawahkan:
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Utama dan Jenjang Ahli Madya.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Kawasan Permukiman;
- c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengelolaan Izin Lokasi;
- f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
- i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
- j. Penetapan Tanah Ulayat;
- k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- m. Penatagunaan Tanah;
- n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
- o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
- p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;

- q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
- r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
- s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.

Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 tahun 2022 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Menetapkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;

- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Pengembangan Perumahan;
 - b. Kawasan Permukiman;
 - c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Pengelolaan Izin Lokasi;
 - f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
 - g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
 - i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
 - j. Penetapan Tanah Ulayat;
 - k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - m. Penatagunaan Tanah;
 - n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
 - o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
 - p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
 - q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;

- r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
 - s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas -117 - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan

- kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas;
 - 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset,

kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan;
- 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
- 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Perangkat Daerah;
- 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada dinas;
- 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dinas;
- 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada dinas;
- 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
- 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 15) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
 - e. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta

Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Menengah.

- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Bidang Permukiman

- a. Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi;
 - a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;

- c. Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Bidang Pertanahan

- a. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pertanahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi;
 - c. Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi;

- d. Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN);
- e. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
- k. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- l. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
- m. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
- n. Rekomendasi Teknis Membuka Tanah;
- o. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
- p. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
- q. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah;
- r. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin;

- s. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat;
 - t. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong;
 - u. Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten;
 - v. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan;
 - w. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil;
 - x. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH); dan
 - y. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 58 orang. Menurut Golongan Jabatan lebih didominasi golongan III sebanyak 47 orang (81,03%) hal ini sejalan dengan umur pegawai. Menurut Pendidikan lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 28 orang (48,27%) dan dibarengi dengan tingkat pendidikan magister (S2) sebanyak 23 orang (39,65%) artinya memiliki potensi yang cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi. Menurut Peta Jabatan, jabatan struktural sebanyak 6 jabatan dan telah terisi, jabatan sub koordinator

dari tiap- tiap bidang sebanyak 9 Jabatan dan sudah terisi sebanyak 9 Orang. Pejabat fungsional arsiparis sebanyak 1 orang, sehingga ke depan diharapkan jabatan fungsional lebih dioptimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam melaksanakan tupoksi. Menurut Jenis Kelamin lebih didominasi jenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang (77,58%). Potensi SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 1 sampai dengan tabel 1.1

Tabel 1.1 Daftar Pegawai PNS Berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN								JUMLAH	KETERANGAN
	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1	23	28		5	1			58 Orang	
	1	23	28	0	5	1	0	0	58 Orang	

Tabel 1.2 REKAPITULASI JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN						
NAMA DAERAH : PROVINSI BANTEN						
No.	Urusan	JUMLAH PEGAWAI				
		Gol 1	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)
1	Kepala Dinas (Eselon II)				1	1
2	Eselon III			1	3	4
3	Eselon IV			1		1
4	JFT / Penyetaraan			7	3	10
5	Staf / Pelaksana		1	38	3	42
JUMLAH *)		0	1	47	10	58

Sarana dan Prasarana

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menempati Gedung Perkantoran seluas 2.255,88 M2. Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tupoksi pelayanan berupa peralatan dan asset keseluruhan tercatat sejumlah Rp. 1.055.695.031,42. Alat angkutan darat roda 4 sebanyak 24 unit dalam kondisi baik. Alat angkutan darat roda 2 sebanyak 32 unit, semua dalam kondisi baik. Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 4.804 unit dalam

kondisi baik. Data sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

1.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

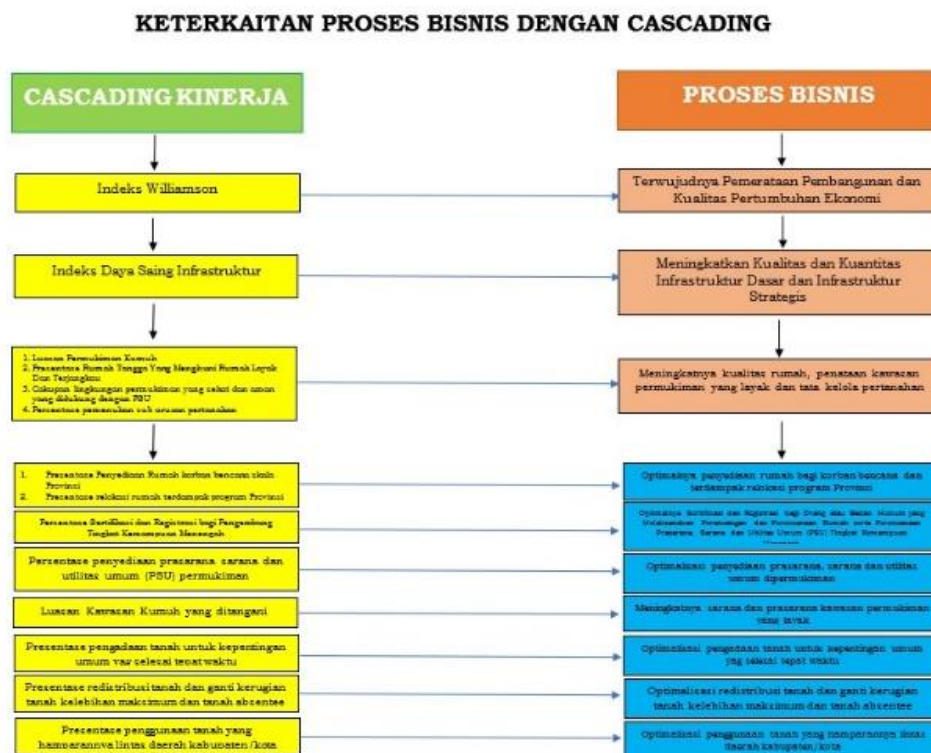
Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten periode 2023-2026 sebagai berikut :

- a. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Provinsi Banten.
 - ✚ Masih terdapatnya *backlog* (kepemilikan) yang tinggi di wilayah Provinsi Banten
 - ✚ Belum terjangkaunya sistem pembiayaan formal oleh masyarakat yang memiliki preferensi hunian layak huni sesuai dengan ekosistem pembiayaan yang ada
 - ✚ Bank – Bank Hibrida yang melaksanakan program rumah subsidi melalui FLPP (sekarang BP Tapera) belum terkoneksi dengan preferensi bagi masyarakat terutama informal (masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak tetap namun layak secara finansial mis: pemilik usaha UMKM, entrepreneurship, dll)
 - ✚ Kompleksnya rantai pasok penyediaan rumah umum (subsidi dan komersil) belum mampu untuk mengoptimalkan harga perolehan rumah dan juga efektivitas layanan Seperti pembebasan lahan, bahan baku perumahan, teknologi, pajak, perijinan, manajemen, serah terima PSU, dsb

- b. Belum optimalnya fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi.
- + Masih rendahnya pemahaman masyarakat bertempat tinggal di daerah rawan bencana dan pemahaman masyarakat terhadap rumah tahan bencana
 - + Terbatasnya ketersediaan lahan pada zona aman bencana
 - + Banyaknya hunian yang berada pada kawasan rawan bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, puting beliung, abrasi/gelombang pantai, longsor dan sebagainya
 - + Penyediaan atau stok lahan perumahan yang aman dari bencana
- c. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertangani kewenangan provinsi.
- + Masih terdapatnya kawasan kumuh di wilayah Provinsi Banten
 - + Kurang optimalnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di Provinsi Banten juga menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi
 - + Masih ada rumah tangga yang memiliki hunian dengan luasan kurang dari 7 m² per kapita
 - + Terdapat rumah dengan dinding yang belum memenuhi standar seperti menggunakan anyaman bambu, batang kayu, bambu dan lainnya
 - + Masih adanya rumah tangga yang membuang tinja (limbah padat) ke sungai, danau, kolam, sawah, lubang tanah, pantai, kebun, dan lainnya
 - + Masih memiliki permasalahan kawasan kumuh pada aspek bangunan, jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air minum, status tanah, ketersediaan fasilitas damkar yang belum memenuhi standar perumahan yang aman dan layak huni
- d. Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan persampahan, jalan lingkungan, drainase lingkungan dan sanitasi di kawasan permukiman.
- + belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman

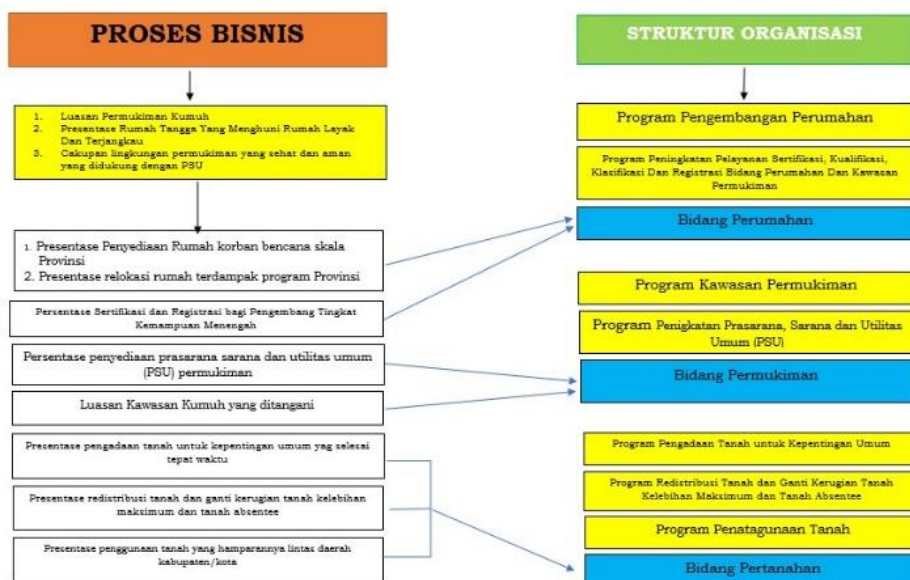
- ✚ masih kurangnya kualitas penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman
 - ✚ rendahnya kualitas sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta prasarana sarana, dan utilitas umum
- e. Belum ada penetapan lokasi kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi.
- f. Masih minimnya penyelesaian kasus tanah negara.
- ✚ Masalah sengketa tanah garapan
 - ✚ Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah
 - ✚ Masalah ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
 - ✚ Masalah tanah kosong

1.6 Proses Bisnis



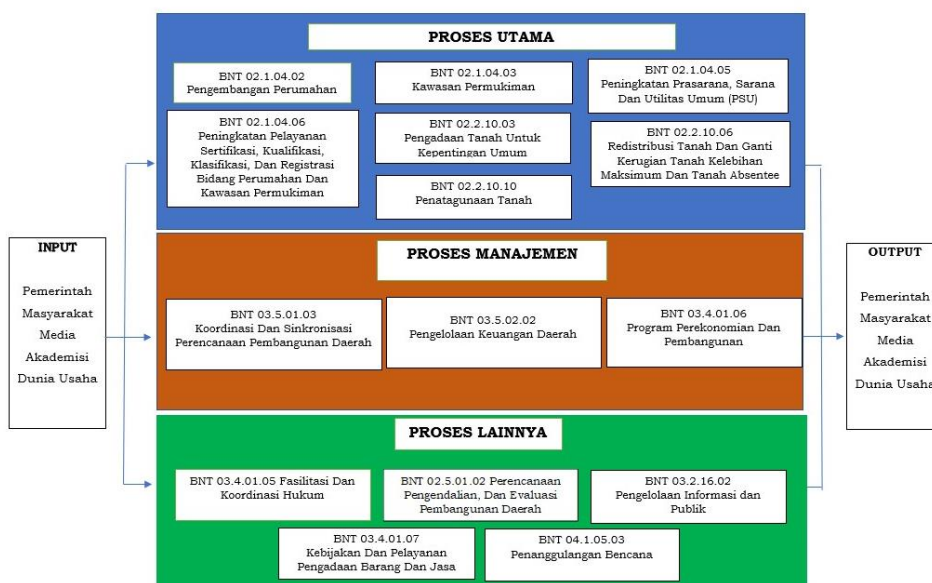
Gambar 1.2 Keterkaitan Proses Bisnis dengan Cascading

KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.3 Keterkaitan Proses Bisnis dengan Struktur Organisasi

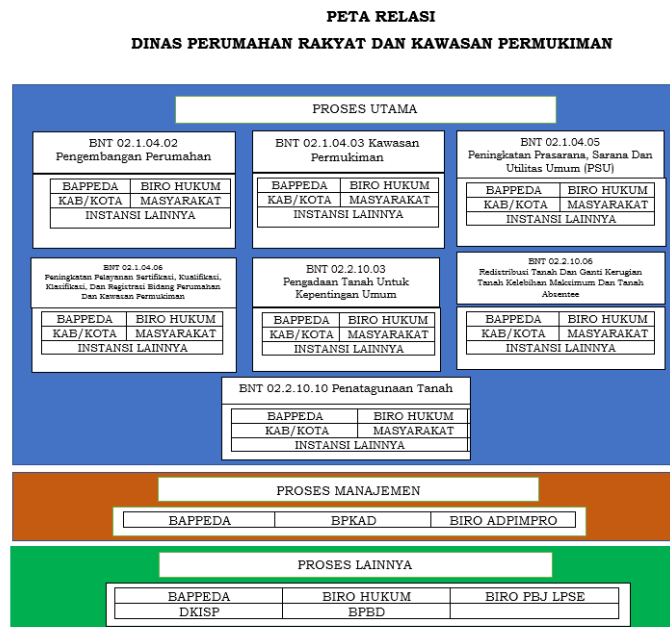
PETA PROSES BISNIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Gambar 1.4 Proses bisnis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

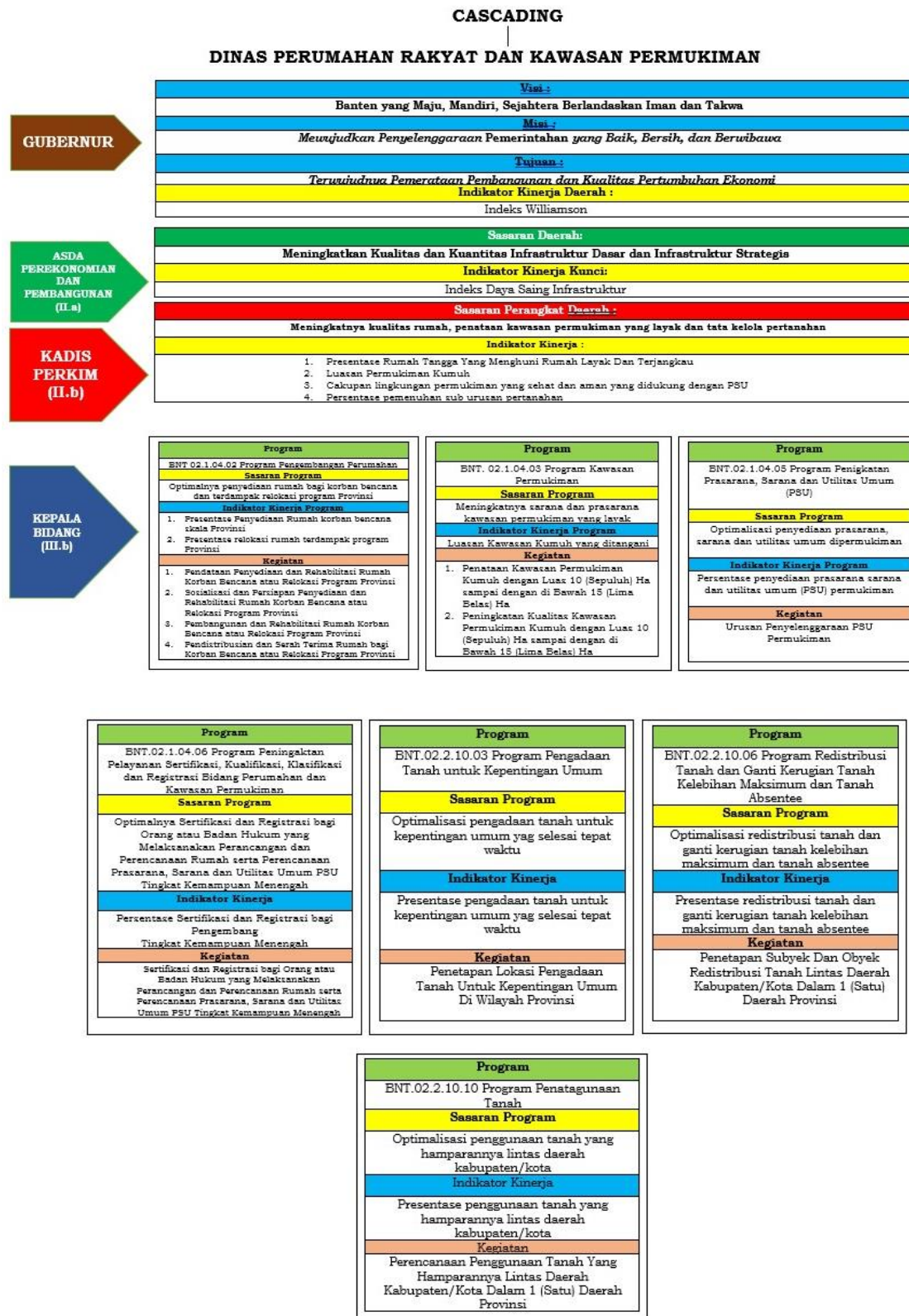


Gambar 1.5 Peta Sub Proses Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Gambar 1.6 Peta Relasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.7 Cascading



Gambar 1.7 Cascading Dinas Perkim

1.8 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2022

Tabel 1.4 Tindak Lanjut LHE Tahun 2022

No	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PROGRES TL			EVIDENCE YANG DISAMPAIKAN
				Belum	Dalam Proses	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan perencanaan kinerja telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "BB", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan untuk mencapai perjanjian kinerja	Mengoptimalkan aktivitas kinerja dalam rencana aksi sebagai upaya dalam mencapai perjanjian kinerja	Menyiapkan/menyusun laporan dan dokumentasi evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi atas aktivitas yang telah direncanakan			✓	Laporan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2022
2.	Belum terdapat inovasi yang dikembangkan oleh internal Perangkat Daerah dalam upaya memudahkan dan atau membantu proses penyelenggaraan pelaporan capaian kinerja	Melakukan inovasi yang dikembangkan oleh internal Perangkat Daerah dalam upaya memudahkan dan atau membantu proses penyelenggaraan perencanaan, pengukuran dan pelaporan capaian kinerja, seperti sistem informasi perencanaan, pengumpulan data dan capaian kinerja	Menyiapkan/membangun sistem informasi perencanaan dan pengumpulan data sebagai alat ukur pencapaian kinerja terhadap perjanjian kinerja perangkat daerah		✓		Aplikasi disiapkan oleh Bappeda Provinsi Banten
3.	Evaluasi internal atas akuntabilitas capaian indikator kinerja telah dilaksanakan, namun terdapat hal-hal yang belum optimal sebagai berikut: a) Pelaksanaan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten b) Belum ada peningkatan implementasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi, hal tersebut lebih disebabkan pada rekomendasi pada tahun sebelumnya sebatas pada pemenuhan dokumen pendukung, belum pada kualitas atas hasil dokumen pendukung, belum pada kualitas atas hasil dokumen yang telah disusun c) Hasil evaluasi dalam pemenuhan dokumen penyelenggaraan AKIP seperti dokumen rencana aksi, monitoring dan evaluasi, serta LKJIP, namun belum sepenuhnya berpengaruh terhadap capaian kinerja sasaran	Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas capaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah	a) Melakukan evaluasi triwulanan monitoring dan evaluasi dengan menyajikan analisis penyesuaian strategi dan kebijakan pada capaian kinerja yang tidak tercapai sesuai target b) Menyusun tindak lanjut rencana aksi perangkat daerah			✓	a) Monev triwulanan internal b) Laporan tindak lanjut rencana aksi c) Laporan kinerja triwulanan sub kegiatan, kegiatan, program dan sasaran

1.9 Sistematika Penulisan

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Ini berisikan empat bab Utama yang terdiri dari : (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kineja; (3) Akuntabilitas Kinerja; dan (4) Penutup.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja; tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja samai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja;
- 2) Surat pernyataan telah direviu oleh Inspektorat.

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2023-2026

Sebuah Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka menengah (*mid-term planning*), yang terdiri atas visi, misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh OPD pada tahun ke-5 (lima) mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan tujuan OPD dimasa yang akan datang.

Dalam periode 2023-2026, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah

**“BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN
DAN TAQWA”**

sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Banten lebih sejahtera.

Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 sebagai bentuk konkret upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut. Adapun Misi Pembangunan ProvinsinBanten tahun 2005-2025 yaitu:

- 1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;

- 2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
- 3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
- 4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Tabel 2.1

Rencana Strategis Tahun 2023-2026

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi								
		1.1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	72	70-80	70-80	70-80	70-80
		1.2	Meningkatnya Kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata Kelola pertanahan	Luasan permukiman kumuh	264.00	219,00	160,00	64,89	0

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	60,79	60,81	60,83	60,85	60,88
			Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	88,97	91,73	94,48	97,24	100
			Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	100	100	100	100	100

2.1.1 Visi Dan Misi

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi Renstra periode tahun 2017-2022 serta memperhatikan RPJMD tahun 2017-2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026, sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Adapun tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022 - 2026 yang mengacu kepada empat (4) misi diatas diuraikan sebagai berikut: 1) Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas, dilakukan melalui dua tujuan yaitu: (i) meningkatkan kualitas sumber daya Manusia; (ii)

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja. 2) Misi 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan, dilakukan melalui satu (1) tujuan yakni meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. 3) Misi 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari, dilakukan melalui satu (1) tujuan yakni mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. 4) Misi 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, dilakukan melalui satu (1) tujuan yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun tujuan pada rencana strategis tahun 2022 – 2026 yang hendak dicapai dan selaras dengan amanat RPJPD 2005 -2025 dan RPD 2022 – 2026 adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman dan Keciptakarya yang Handal berlandaskan Iman dan Taqwa guna mencapai Lingkungan yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan”**. Selanjutnya, lebih ringkas keterkaitan antara misi RPJPD, tujuan RPD Tahun 2022 – 2026 dengan Renstra Dinas PKP Tahun 2022 – 2026 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan RPD dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

Misi RPJPD	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Tujuan PD/Renstra	Indikator Tujuan PD
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Indeks Williamso n	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah.	(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukima n yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggara n pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah
--	--	----------------------------	--	--------------------------------

Sasaran yang hendak dicapai guna meraih tiap tujuan Renstra PD Tahun 2022 – 2026 mengarah kepada sasaran dan tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2022 – 2026 serta Misi RPJPD Tahun 2005 – 2025. Keterkaitan antara sasaran Renstra PD dengan tujuan PD mencerminkan pelaksanaan urusan, sub urusan, program dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 2 misi dan 2 tujuan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yaitu: Misi - Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan dengan tujuan Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Misi - Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Lebih disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Sasaran RPD Tahun 2022 – 2026 dan Renstra
Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

Misi		Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur	1)Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv)

					Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Capaian SAKIP Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah

2.1.2 Strategi

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026. Sebagaimana telah diatur, terdapat beberapa strategi yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, diantaranya:

1. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, serta pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan
 - b. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;
 - c. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah.

Oleh karena itu, strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, mencakup:

Tabel 2.4 Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 – 2026

Misi RPD 2023 - 2026	Strategi RPD 2023 – 2026	Strategi Renstra PD 2023 - 2026
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	1) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;	1) Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas; 2) Meningkatkan penanganan penyediaan

	2) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah	rumah bagi korban bencana; 3) Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi; 4) Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman; 5) Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan;
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2.1.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 mempedomani pada arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023 – 2026. Berikut ini adalah Kebijakan yang diambil oleh perangkat daerah dalam rangka keselarasan dan upaya untuk meraih tujuan pelaksanaan urusan perangkat daerah. Strategi Rencana Dinas 2023 – 2026 disajikan pada Tabel 2.5

Tabel 2.5 Kebijakan RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 – 2026

Misi RPD 2023 - 2026	Kebijakan RPD 2023 - 2026	Kebijakan Renstra PD 2023 - 2026
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	1) Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik; 2) Penataan kawasan permukiman, infrastruktur permukiman kumuh	1) Optimalisasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha yang berkualitas; 2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha 3) Optimalisasi Pendataan Penyediaan Rumah Korban

		Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 4) Meningkatkan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 5) Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah khusus bagi korban bencana; 6) Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program provinsi; 7) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman; 8) Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman Pemenuhan sub urusan pertanahan
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan.	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Selanjutnya, keselarasan antara Misi RPJPD 2005 – 2025, RPD 2023 – 2026 dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026

Visi RPJPD Tahun 2005 – 2025: “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”			
Misi 2 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah	1. Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	1. Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas; 2. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana; 3. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi; 4. Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman; 5. Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan;	1. Optimalisasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha yang berkualitas; 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha; 3. Optimalisasi Pendataan Penyediaan 4. Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 5. Meningkatkan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 6. Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah khusus bagi korban bencana; 7. Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi; 8. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman; 9. Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan
--	---	---	---

			kawasan permukiman; 10. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu
Misi 4 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.			
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Dari Arah Kebijakan tersebut didapatkan beberapa prioritas pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Banten
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Provinsi
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman.

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	METODELOGI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	5	6	7	8
	Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi					
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Data Nilai Hasil Evaluasi AKIP perangkat daerah yang dinilai oleh Inspektorat yang terdiri dari komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi	Inspektorat	KEPALA DINAS PERKIM

2	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	= (Jumlah penyediaan PSU permukiman pada Tahun n yang ditangani oleh Provinsi)/(Jumlah rencana penyediaan PSU permukiman pada Tahun n yang ditangani oleh Provinsi) x 100	Data dikumpulkan melalui Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Rekapitulasi yang dikumpulkan melalui hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Permukiman yang ditangani tahun anggaran 2023 sedangkan data rencana penyediaan PSU permukiman yang akan ditangani oleh provinsi dikumpulkan melalui usulan masyarakat ke Dinas Perkim Provinsi Banten	Dinas Perkim	
		Luasan permukiman kumuh	=Luasan permukiman kumuh yang tertangani	Data kinerja dikumpulkan melalui sub kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Data rekapitulasi luasan kumuh hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan kualitas kawasan kumuh serta perbaikan rumah tidak layak huni kewenangan Provinsi 10 s.d dibawah 15 ha	Dinas Perkim	

		Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	$= (\text{Jumlah rumah layak huni yang ditangani oleh Provinsi}) / (\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang menjadi kewenangan Provinsi}) \times 100$	Data kinerja dikumpulkan melalui sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Data rumah tidak layak huni yang ditangani provinsi merupakan data usulan Kabupaten lebak, kabupaten Pandeglang Kabupaten Serang melalui SK penerima bantuan bangunan rumah/relokasi pasca bencana pergerakan tanah Kabupaten Lebak, SK penerima bantuan bangunan rumah pasca bencana terdampak tsunami dan gempa bumi di Kab. Pandeglang seta Sk penerima bantuan bangunan rumah korban banjir bandang Kota Serang	Dinas Perkim	
		Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	$= (\text{jumlah persentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah di tahun N}) / (\text{Total persentase rencana pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah di Tahun N}) \times 100$	Data dikumpulkan melalui proses rapat koordinasi Penetapan Lokasi pengadaan tanah yang merupakan usulan dari pemohon yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Program redistribusi tanah dan ganti rugi tanah dan program penggunaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi karena masih menjadi kewenangan Kanwil ATR/BPN	Dinas Perkim	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

2.2 Perubahan Rencana Kerja 2023

Tujuan, saran dan indikator dan target kinerja pada perubahan rencana kerja tahun 2023 sesuai dengan rencana kinerja murni tahun 2023 termasuk program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kerjanya.

Rencana kerja tahun 2023 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Rencana Kinerja Tahun 2023

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai 70-80
		1.2	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Luasan permukiman kumuh Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen Hektar Persen Persen 100

Sumber : Rencana Kerja Dinas/Badan/Sekretariat Provinsi Banten tahun 2023



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran kinerja Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten dan harapan kinerja Tahun 2023 Perubahan dengan memperhatikan pencapaian misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM), sehingga prioritas penanganan 2023 Perubahan sesuai dengan RKPD, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten melaksanakan program kegiatan dengan gambaran umum sebagai berikut:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan. Terdiri dari 8 program dan 19 kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Sebagian besar program kegiatan tersebar di seluruh provinsi Banten
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah sebesar **Rp. 466.418.058.600,00** (*Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*). Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2023 Perubahan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Perubahan dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ BidangUrusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
1	0 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						465.928.110.800				187.262.666.000
1	0 4	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		100 Persen	32.956.355.666				100 Persen	38.895.716.000	
1	0 4	0 1	1,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	1.468.470.000				100 Persen	1.300.000.000	
1		04	01	1,0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	731.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	633.000.000	
1		04	01	1,0 1	0 2	Koordinasi danPenyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	10.000.000	
1		04	01	1,0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	10.000.000	
1		04	01	1,0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	10.000.000	
1		04	01	1,0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	10.000.000	
1		04	01	1,0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	496.554.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	415.000.000	
1		04	01	1,0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua	4 Laporan	200.236.000	PENDAPATAN ASLI		4 Laporan	212.000.000	
1	0 4	0 1	1,0 2		AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	17.699.394.800				100 Persen	18.222.453.000	
1		04	01	1,0 2	0 1	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	58 Orang/Bulan	15.987.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfe Umum- DanaAlokasi Umum		58 Orang/Bulan	16.472.453.000	
1		04	01	1,0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Dokumen	1.100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	1.100.000.000	

1	04	01	1,0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Dokumen	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	500.000.000
1	04	01	1,0 2	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	12 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	10.000.000
1	04	01	1,0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	20.000.000
1	04	01	1,0 2	0 6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	10.000.000
1	04	01	1,0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulanan/ Semest eran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	18 Laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	100.000.000
1	04	01	1,0 2	0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	10.000.000
1	04	01	1,0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 Persen	400.000.000			100 Persen	18.222.453.000
1	04	01	1,0 3	0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	60.000.000
1	04	01	1,0 3	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	44.828.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	60.000.000
1	04	01	1,0 3	0 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	209.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	25.000.000
1	04	01	1,0 3	0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	25.000.000
1	04	01	1,0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	106.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	80.000.000
1	04	01	1,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	529.775.400			100 Persen	473.263.000
1	04	01	1,0 5	0 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	100.000.000
							Semua Kab/Kota,			PENDAPATAN			

1	04	01	1,0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kecamatan Semua Kelurahan	5 Paket	211.541.400	ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	30.000.000
1	04	01	1,0 5	0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	65.000.000
1	04	01	1,0 5	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	204.584.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	118.263.000
1	04	01	1,0 5	0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	88.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	50.000.000
1	04	01	1,0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua	5 Orang	10.000.000	PENDAPATAN ASLI		5 Orang	100.000.000
1	04	01	1,0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	10.000.000
1	04	01	1,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100 Persen	3.045.563.828			100 Persen	2.200.000.000
1	04	01	1,0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4 Paket	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	150.000.000
1	04	01	1,0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	16 Paket	868.509.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Paket	500.000.000
1	04	01	1,0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Paket	20.176.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	150.000.000
1	04	01	1,0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua	2 Paket	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	50.000.000
1	04	01	1,0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50.000.000
1	04	01	1,0 6	0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	164 Paket	1.230.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		164 Paket	850.000.000
1	04	01	1,0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	57.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	75.000.000
1	04	01	1,0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	297.628.428	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	200.000.000
1	04	01	1,0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	163.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100.000.000

1	04	01	1,0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	58.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	75.000.000
1	04	01	1,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	2.676.324.100			100 Persen	10.250.000.000
1	04	01	1,0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Unit	1.924.613.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	10.000.000.000
1	04	01	1,0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	37 Unit	751.711.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		37 Unit	250.000.000
1	04	01	1,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	4.450.506.538			100 Persen	4.500.000.000
1	04	01	1,0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua	12 Laporan	25.056.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	50.000.000
1	04	01	1,0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	349.345.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	400.000.000
1	04	01	1,0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	50.000.000
1	04	01	1,0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	4.026.104.938	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	4.000.000.000
1	04	01	1,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	2.660.032.600			100 Persen	1.700.000.000
1	04	01	1,0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	17 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Unit	200.000.000
1	04	01	1,0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	56 Unit	1.138.670.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56 Unit	600.000.000
1	04	01	1,0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	376 Unit	446.362.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		376 Unit	350.000.000
1	04	01	1,0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Unit	575.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	250.000.000
1	04	01	1,0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Unit	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	300.000.000

1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah korban bencanaskala provinsi		43,50 Persen 25 Persen	22.233.732.500		43,50 Persen 25 Persen	18.660.000.000
1	04	02	1,0 1		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 Persen	1.425.085.600		100 Persen	1.510.000.000
1	04	02	1,0 1	0 1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3 Dokumen	325.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	250.000.000
1	04	02	1,0 1	0 2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	625.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	250.000.000
1	04	02	1,0 1	0 3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	260.000.000
1	04	02	1,0 1	0 4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	250.000.000
1	04	02	1,0 1	0 5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	250.000.000
1	04	02	1,0 1	0 6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	173.885.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	250.000.000
1	04	02	1,0 2		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 Persen	244.440.000		100 Persen	400.000.000
1	04	02	1,0 2	0 4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 Orang	244.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Orang	400.000.000
1	04	02	1,0 3		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 Persen	20.425.935.900		100 Persen	16.500.000.000
1	04	02	1,0 3	0 2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	13 Dokumen	1.245.065.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13 Dokumen	500.000.000
1	04	02	1,0 3	0 3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	500.000.000
1	04	02	1,0 3	0 4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	120 Unit Rumah	11.559.954.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120 Unit Rumah	9.000.000.000
					Pembangunan Rumah Khusus		Semua Kab/Kota,					

1	04	02	1,0 3	0 5	beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Peserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Semua Kecamatan Semua Kelurahan	262 Unit Rumah	7.620.916.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		262 Unit Rumah	6.500.000.000
1	0 4	0 2	1,0 4		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 Persen	138.271.000			100 Persen	250.000.000
					atau Relokasi Program Provinsi								
1	04	02	1,0 4	0 2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	138.271.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	250.000.000
1	0 4	0 3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani		109,42 Ha	76.252.227.661			109,42 Ha	76.800.000.000
1	0 4	0 3	1,0 1		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Ketercapaian kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		100 Persen	2.509.255.350			100 Persen	1.000.000.000
1	04	03	1,0 1	0 2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	91.384.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	150.000.000
1	04	03	1,0 1	0 7	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	111.320.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	200.000.000
1	04	03	1,0 1	0 8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.031.451.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	150.000.000
1	04	03	1,0 1	0 9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3 Laporan	275.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	500.000.000
1	0 4	0 3	1,0 2		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Ketercapaian kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		100 Persen	73.742.972.311			100 Persen	75.800.000.000
1	04	03	1,0 2	0 1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	n 10 Dokume	3.886.138.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokume	n 1,800,000,000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Perumahan/ Perumahan Permukiman Kumuh dan								

1	04	03	1,0 2	0 2	Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (LimaBelas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	19 Laporan	4.657.045.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 Laporan	4.000.000.000
1	04	03	1,0 2	0 3	Perbaikan RumahTidak Layak Hunidalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (LimaBelas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	247 Unit Rumah	17.261.060.025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		247 Unit Rumah	5.000.000.000
1	04	03	1,0 2	0 7	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengandi Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (LimaBelas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	109.42 Ha	47.938.727.886	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		109.42 Ha	65.000.000.000
1	0 4	0 5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penyediaan prasarana sarana danutilitas umum (PSU) permukiman		91,73 Persen	334.004.025.37 3			91,73 Persen	52.556.950.000
1	0 4	0 5	1,0 1		Urusan PenyelenggaraanPSU Permukiman	Persentase Ketercapaian kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		100 Persen	334.004.025.37 3			100 Persen	52.556.950.000
1	04	05	1,0 1	0 1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	37 Dokumen	2.577.810.680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		37 Dokumen	1,000,000,000
1	04	05	1,0 1	0 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumdi Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan n Semua Kelurahan	1567 Lokasi	305.342.253.579	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1567 Lokasi	48.556.950.000
1	04	05	1,0 1	0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalamrangka Penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	224 Laporan	26.083.961.114	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		224 Laporan	3.000.000.000
1	0 4	0 6			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASIBIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orangatau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		100 Persen	481.769.600			100 Persen	350.000.000
1	0 4	0 6	1,0 1		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan danPerencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat KemampuanMenengah	Persentase Ketercapaian kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		100 Persen	481.769.600			100 Persen	350.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan RegistrasiPengembang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan						

1	04	06	1,0 1	0 1	Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Semua Kelurahan	1 Laporan	481.769.600			1 Laporan	350.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	1 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				489.947.800			500.000.000	
2	1 0	0 3			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		100 Persen	138.464.100			100 Persen	100.000.000
2	1 0	0 3	1,0 1		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		100 Persen	138.464.100			100 Persen	100.000.000
2	10	03	1,0 1	0 1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	138.464.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100.000.000
2	1 0	0 6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		100 Persen	176.928.200			100 Persen	200.000.000
2	1 0	0 6	1,0 1		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100 Persen	176.928.200			100 Persen	200.000.000
2	10	06	1,0 1	0 2	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	88.464.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100.000.000
2	10	06	1,0 1	0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Berita Acara	88.464.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Berita Acara	100.000.000
2	1 0	1 0			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota		100 Persen	174.555.500			100 Persen	200.000.000
2	1 0	1 0	1,0 1		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100 Persen	174.555.500			100 Persen	200.000.000
2	10	10	1,0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	86.091.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	100.000.000
2	10	10	1,0 1	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	88.464.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100.000.000
TOTAL									466.418.058.600				225.662.666.000

Tabel 2.10 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 Perubahan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		100 Persen	32.956.355.666		100 Persen	38.895.716.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	1.468.470.000		100 Persen	1.300.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	731.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	633.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	10.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	496.554.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	415.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4 Laporan	200.236.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	212.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100 Persen	17.699.394.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Persen	18.222.453.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		58 Orang/ Bulan	15.987.000.000	, Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	58 Orang/ Bulan	16.472.453.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Dokumen	1.100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	1.100.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Dokumen	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	500.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	10.000.000

	Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	20.000.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan SKPD	Jumlah Laporan Ke Bulanan/Triwulanan/Semester dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	18 Laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 Laporan	100.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	10.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 Persen	400.000.000		100 Persen	18.222.453.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	60.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	1 Dokumen	44.828.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	60.000.000

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	209.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	25.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	25.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	106.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	80.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	529.775.400		100 Persen	473.263.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	100.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	5 Paket	211.541.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Paket	30.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	65.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	204.584.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	118.263.000

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	88.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	50.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	5 Orang	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	100.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Orang	10.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100 Persen	3.045.563.828	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Persen	2.200.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4 Paket	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	150.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	16 Paket	868.509.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 Paket	500.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Paket	20.176.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Paket	150.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Paket	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Paket	50.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	50.000.000

Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	164 Paket	1.230.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	164 Paket	850.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	57.450.000		1 Laporan	75.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	297.628.428	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	200.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	163.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	58.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	75.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	2.676.324.100		100 Persen	10.250.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Unit	1.924.613.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	10.000.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	37 Unit	751.711.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37 Unit	250.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	4.450.506.538		100 Persen	4.500.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	25.056.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	50.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	349.345.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	400.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	50.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	4.026.104.938	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	4.000.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	2.660.032.600		100 Persen	1.700.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	17 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 Unit	200.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	56 Unit	1.138.670.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56 Unit	600.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	376 Unit	446.362.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	376 Unit	350.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Unit	575.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	250.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Unit	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	300.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah korban bencana skala provinsi		43,5 Persen 25 Persen	22.233.732.500		43,5	18.660.000.000
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 Persen	1.425.085.600		100 Persen	1.510.000.000
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3 Dokumen	325.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	250.000.000
Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	625.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	250.000.000
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	260.000.000

Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	250.000.000
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	250.000.000
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	173.885.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	250.000.000
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 Persen	244.440.000		100 Persen	400.000.000
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 Orang	244.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Orang	400.000.000
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 Persen	20.425.935.900		100 Persen	16.500.000.000

Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	13 Dokumen	1.245.065.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13 Dokumen	500,000,000
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	500.000.000
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	120 Unit Rumah	11.559.954.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120 Unit Rumah	9.000.000.000
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	262 Unit Rumah	7.620.916.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	262 Unit Rumah	6.500.000.000
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 Persen	138.271.000		100 Persen	250.000.000
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	138.271.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	250.000.000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani		109,42 Ha	76.252.227.661		109,42 Ha	76.800.000.000

Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Ketercapaian kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		100 Persen	2.509.255.350		100 Persen	1.000.000.000
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	91.384.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	150.000.000
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	111.320.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	200.000.000
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.031.451.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	150.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3 Laporan	275.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	500.000.000

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Ketercapaian kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		100 Persen	73.742.972.311		100 Persen	75.800.000.000
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	10 Dokumen	3.886.138.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Dokumen	n 1,800,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	19 Laporan	4.657.045.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19 Laporan	4.000.000.000

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	247 Unit Rumah	17.261.060.025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	247 Unit Rumah	5.000.000.000
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	109.42 Ha	47.938.727.886	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.42 Ha	65.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman		91,73 Persen	334.004.025		91,73 Persen	52.556.950.000
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Ketercapaian kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		100 Persen	334.004.025		100 Persen	52.556.950.000
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	37 Dokumen	2.577.810.680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37 Dokumen	1,000,000,000
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1567 Lokasi	305.342.253.579	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1567 Lokasi	48.556.950.000

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	224 Laporan	26.083.961.114	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	224 Laporan	3.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		100 Dokumen	481.769.600		100 Dokumen	350.000.000
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Ketercapaian kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		100 Persen	481.769.600		100 Persen	350.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	481.769.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	350.000.000

	Dengan Kualifikasi Menengah						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				489.947.800			500.000.000
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		100 Persen	138.464.100		100 Persen	100.000.000
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		100 Persen	138.464.100		100 Persen	100.000.000
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	138.464.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100.000.000
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		100 Persen	176.928.200		100 Persen	200.000.000
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100 Persen	176.928.200		100 Persen	200.000.000

Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	88.464.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Berita Acara	88.464.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Berita Acara	100.000.000
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota		100 Persen	174.555.500		100 Persen	200.000.000
Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100 Persen	174.555.500		100 Persen	200.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	86.091.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	100.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	88.464.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100.000.000
TOTAL				132.748.037.252			187.762.666.000

2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pemerintah Daerah Banten telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 seperti terlihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten Tahun 2023

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	Luasan permukiman kumuh	Ha	219
3		Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	%	60,83
4		Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	91,73
5		Persentase pemenuhan suburusan pertanahan	%	100

Tabel 2.12

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2023

No	Sasaran Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program Dan Kegiatan)	Satuan	Target	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH				
	Sasaran Program: Meningkatkan Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	38.387.050.000

	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah	Persen	100	1.500.000.000
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	16.232.050.000
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	955.000.000
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100	3.100.000.000
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	9.150.000.000
	Sasaran Kegiatan: tersusunnya seluruh laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase tersusunnya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100	400.000.000
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2,550.000.000
	Sasaran Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	9.150.000.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
	Sasaran Program: Optimalnya penyediaan rumah bagi korban bencana dan terdampak relokasi program Provinsi	Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	Persen	62,34	21.500.000.000
		Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi	Persen	50,00	

	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	8	1.500.000.000
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	60	150.440.000
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persen	100	19.649.560.000
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	200.000.000
3	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Sasaran Program: Optimalnya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	Persen	100	500.000.000
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan	Laporan	1	500.000.000

	Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah			
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
	Sasaran Program: Meningkatnya sarana dan prasarana kawasan permukiman yang layak	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Hektar	219 Ha	80.798.000.000
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	6	2.700.000.000
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	Persen	100	78.098.561.700
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
	Sasaran Program: Optimalisasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dipermukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen	91,73	379.526.950.000
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persen	100	379.526.950.000
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				

	Sasaran Program: Optimalisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100	100.000.000
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah	Dokumen	1	100.000.000
7	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
	Sasaran Program: Optimalisasi redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	100	200.000.000
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	200.000.000
8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
	Sasaran Program: Optimalisasi penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100	200.000.000
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pendukung perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Dokumen	1	200.000.000

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan Agustus tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.13

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	Luasan permukiman kumuh	Ha	219
3		Presentase rumah tanggayang menghuni rumah layak dan terjangkau	%	60,83
4		Cakupan lingkungan permukiman yang sehat danaman yang didukung denganPSU	%	91,73
5		Persentase pemenuhan suburusan pertanahan	%	100

Tabel 2.14

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten Tahun 2023

No	Sasaran Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program Dan Kegiatan)	Satuan	Target	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				
	Sasaran Program: Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	31.642.335.066
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	1.533.470.000
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	16.214.394.700
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	482.584.400
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100	3.444.714.228
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	4.450.506.538

	Sasaran Kegiatan: tersusunnya seluruh laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase tersusunnya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100	426.584.400
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2.660.032.600
	Sasaran Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	2.430.344.100
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
	Sasaran Program: Optimalnya penyediaan rumah bagi korban bencana dan terdampak relokasi program Provinsi	Persentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	Persen	62,34	28.809.150.604
		Persentase relokasi rumah terdampak program Provinsi	Persen	50,00	
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	8	1.425.085.600
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	60	168.481.104

	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persen	100	27.077.512.900
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	138.271.000
3	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Sasaran Program: Optimalnya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	Persen	100	481.768.600
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Laporan	1	481.768.600

	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	PSU Tingkat Kemampuan Menengah			
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
	Sasaran Program: Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan permukiman yang layak	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Hektar	219 Ha	78.100.700.000
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	6	2.700.000.000
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	Persen	100	78.098.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
	Sasaran Program: Optimalisasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dipermukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen	91,73	346.460.606.973
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persen	100	346.460.606.973

6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				
	Sasaran Program: Optimalisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100	88.464.100
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah	Dokumen	1	88.464.100
7	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
	Sasaran Program: Optimalisasi redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	100	176.928.200
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	176.928.200
8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
	Sasaran Program: Optimalisasi penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100	174.555.500

	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pendukung perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Dokumen	1	174.555.500
--	---	--	---------	---	-------------

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Provinsi Banten dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja

sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi sesuai dengan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemrukiman Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	70-80				
2	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	Luasan permukiman kumuh	219 Ha	328,58 Ha	$305,00/219=137,27\%$	Sangat Baik	Kabid
3		Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	60,83%	77,55%	$77,55/60,85=127,49\%$	Sangat Baik	Kabid
4		Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	91,73%	99,44%	$99,44/91,75=108,41\%$	Sangat Baik	Kabid
5		Persentase pemenuhan sub	100%	100%	$100/100=100\%$	Baik	Kabid

		urusan pertanahan					
--	--	----------------------	--	--	--	--	--

Realisasi kinerja tahun 2023 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) telah sesuai dengan Laporan Kinerja Indiktor Sasaran Triwulan IV. Seperti yang tertuang dalam matrik berikut ini:

Tabel 3.3

Laporan Kinerja Indiktor Sasaran Triwulan IV

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Satuan	Target Tahunan	Realisasi s/d Triwulanan IV	Capaian Triwulanan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	M. Rachmat Rogianto, ST, MT	Nilai	70-80	87,00	108,75
2	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	Luasan permukiman kumuh	M. Rachmat Rogianto, ST, MT	Ha	219,00	305,00	139,27
		Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	M. Rachmat Rogianto, ST, MT	%	60,83	77,55	127,49
		Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	M. Rachmat Rogianto, ST, MT	%	91,73	99,44	108,41
		Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	M. Rachmat Rogianto, ST, MT	%	100,00	100,00	100,00

Uraian penjelasan dan analisis capaian pada tabel:

1. Indikator Nilai Sakip ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 70-80 (B) dan data sementara realiasi sebesar 80,05 (A) atau mencapai target sebesar 96,45 % dalam kategori **sangat baik**
2. Luasan permukiman kumuh melebihi target IKU dengan kategori **sangat baik**, hal tersebut dikarenakan pada target luasan kumuh tahun 2023 melebihi target pada IKU tahun 2023, sehingga mempengaruhi pencapaiannya. Kawasan kumuh merupakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2023, selain itu adanya dorongan dari Kabupaten/Kota untuk segera dilaksanakan. Hasil pencapaian indikator tersebut yaitu peningkatan kualitas Kawasan kumuh kewenangan provinsi 10 sd. Dibawah 15 Ha seluas 308,00 Ha dari target seluas 219 Ha.
3. Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau pada tahun 2023 sebesar 60,85% dan realisasi sebesar 77,55% dalam katerori sangat baik. Adapun yang mendukung pencapaian terhadap indikator ini yairu pembangunan rumah korban bencana dengan target 499 unit rumah layak huni yang ditangani provinsi, 231 pembangunan rumah korban bencana, 247 peningkatan rumah layak huni di Kawasan kumuh dan 20 unti pembangunan rumah bagi masyarakat miskin, sedangkan realisasinya 120 pembangunan rumah korban bencana, 247 peningkatan rumah layak huni di Kawasan kumuh dan 20 unuk pembangunan rumah bagi masyarakat miskin
4. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan target 91,73% dan realisasi sebesar 99,44% dengan kategori sangat baik. Adapun yang mendukung pencapaian terhadap indicator ini adalah pembangunan/peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum di 7 Kab/Kota sebanyak 1610 lokasi dari target 1619 lokasi
5. Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan denga target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Adapun yang mendukung

pencapaian terhadap indikator ini adalah penetapan lokasi sebanyak 8 lokasi yang merupakan usulan baru dan perpanjangan yang ditetapkan dalam SK Gubernur tentang Penetapan Lokais.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, pada umumnya telah mencapai kinerja yang diharapkan dengan kategori sangat baik. Rata-Rata tingkat capaian kinerja sasaran untuk tahun 2023 mencapai nilai 100% bahkan terdapat capaian di atas 100%.

A. Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelenggaraan Pemerintahan

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran 1 tahun 2023 dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi diambil dari data nilai SAKIP Tahun 2022 karena nilai SAKIP tahun 2023 belum ditetapkan. Adapun uraiannya sebagai berikut :

- a. Indikator Nilai SAKIP ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 81 (A) dan data sementara realiasi sebesar 80,95 (A) atau mencapai target sebesar 99,94 % dalam kategori **sangat baik**.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2022

No .	SASARAN	INDIKATO R KINERJA	SATUA N	TAHUN 2022		
				TARGE T	REALISAS I	CAPAIA N

1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	80,95	99,94%
---	---	--------------------------------	-------	----	-------	--------

A. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan

Capaian kinerja sasaran 2 tahun 2023 pada 4 indikator yaitu Luasan permukiman kumuh, Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau, Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dan Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan. Adapun uraiannya sebagai berikut :

1. **Luasan permukiman kumuh**, berdasarkan renstra 2023-2026 bahwa indikator luasan permukiman kumuh sampai dengan tahun 2023 adalah 219 Ha, dengan realisasi sebesar 109,42 Ha. Capaian indikator sasaran **Luasan Permukiman Kumuh** dengan rumus sebagai berikut:
 = Luas kawasan kumuh yang ditata
 = $342,56 - (100,14 + 109,42) = 133 \text{ Ha}$ (sampai dengan akhir perubahan Renstra tahun 2023-2026).

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh **Program Kawasan Permukiman** dengan indikator programnya adalah **Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani** dimana realisasinya adalah :

= Luas kawasan kumuh yang ditangani
 = 109,42 Ha

- 1) Kegiatan pengampu Program Kawasan Permukiman adalah :

- 1.1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan target kinerja sebesar 6 Dokumen, terealisasi sebesar 5 Dokumen.

$$= \frac{5}{6} \times 100 = 83,33\%$$

- 1.2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan target kinerja sebesar 100,00%, terealisasi sebesar 100,00%.

$$= \frac{100}{100} \times 100 = 100,00\%$$

2. Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau dengan target kinerja 60,83%, rumus perhitungan:

$$= (\text{Jumlah rumah layak huni yang ditangani oleh Provinsi}) / (\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang menjadi kewenangan Provinsi}) \times 100\%$$

$$= \frac{499 - (387 - 499)}{499} \times 100\% = 77,55\%$$

$$= \frac{77,55}{60,85} \times 100 = 127,45\%$$

Penjelasan perhitungan:

Target kinerja indikator Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau berdasarkan Renstra 2023-2026 sampai akhir tahun adalah 531 unit rumah sedangkan target sampai dengan tahun 2023 adalah 231 unit rumah korban bencana dan 247 unit rumah layak huni di kawasan kumuh, serta rumah bagi masyarakat di daerah kemiskinan adaah 20 unit, sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

$$= 231 + 247 + 20$$

$$= 499 \text{ unit rumah layak huni yang ditangani provinsi}$$

Realisasi tahun 2023

$$\text{Rumah korban Bencana} = 120 \text{ unit rumah}$$

$$\text{Rumah layak huni di Kawasan kumuh} = 247 \text{ unit rumah}$$

Rumah bagi masyarakat di daerah kemiskinan = 20 unit rumah

Realisasi rumah layak huni kewenangan provinsi = 387 unit rumah

Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh **Program Pengembangan Perumahan** dengan indikator programnya adalah **Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau** dimana rumus perhitungannya:

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani}) / (\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani}) \times 100 \\ &= \frac{47,27}{43,50} \times 100 = 108,66\% \end{aligned}$$

Target telah tercapai

Penjelasan:

Targe kinerja = $100/531 \times 100\% = 18,83\%$

Target DPA tahun 2022 = $131/531 \times 100\% = 24,67\%$

Target s.d tahun 2023 = $18,83\% + 24,67\% = 43,50\%$

ket: 131 Target tahun 2022

100 target tahun 2023

531 base line selama 5 thn (2022-2026)

Realisasi kinerja = $120/531 \times 100\% = 22,607\%$

Target DPA (sesuai resntra) tahun 2022 = $131/531 \times 100\% = 24,67\%$

Realisasi s.d tahun 2023 = $22,60\% + 24,67\% = 47,27\%$

ket: 120 realisasi tahun 2023

531 base line selama 5 thn (2022-2026)

1) Kegiatan pengampu program Pengembangan Perumahan adalah:

- 2.1 **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**, dengan target kinerja sebesar 6 Dokumen, terealisasi sebesar 6 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{6}{6} \times 100 = 100,00\%$$

- 2.2 **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**, dengan target kinerja sebesar 50 Orang, terealisasi sebesar 50 Orang.

Adapun hasil capaian kinerja kegiatan tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{50}{50} \times 100 = 100,00\%$$

- 2.3 **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**, dengan target kinerja sebesar 100,00%, terealisasi sebesar 100,00%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{100}{100} \times 100 = 100,00\%$$

1. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, pekerjaan pembangunan rumah bencana sebanyak 120 unit rumah
2. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

2.4 **Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**, dengan target kinerja sebesar 1 Laporan, sementara hasil verifikasi SAKIP terealisasi sebesar 1 Laporan.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100,00\%$$

3. **Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan target kinerja 91,73%**, rumus perhitungan :

= (Jumlah penyediaan PSU permukiman pada Tahun n yang ditangani oleh Provinsi)/(Jumlah rencana penyediaan PSU permukiman pada Tahun n yang ditangani oleh Provinsi) x 100

$$= \frac{1610}{1619} \times 100 = 99,44\%$$

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh program sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas** dengan indikator programnya adalah **Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman** dimana rumus perhitungannya:

= (Jumlah penyediaan PSU Permukiman/
Total jumlah penyediaan PSU) x 100

$$= \frac{1610}{1619} \times 100 = 99,44\%$$

2. **Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan**

Permukiman dengan indikator programnya adalah **Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah** dimana rumus perhitungannya

$$\begin{aligned} &= \text{Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penerbitan sertifikasi} \\ &= \frac{1}{1} \times 100 = 100,00\% \end{aligned}$$

1) Kegiatan pengampu program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas adalah:

2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan target kinerja sebesar 100,00%, terealisasi sebesar 99,59%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{99,59}{100} \times 100 = 99,59\%$$

1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman, Target telah tercapai.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman, Target telah tercapai.

Kegiatan pengampu Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah:

2.2 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah dengan target kinerja sebesar 1 Laporan, terealisasi sebesar 1 Laporan.

Adapun hasil capaian kinerja kegiatan tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100,00\%$$

4. **Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan** dengan target kinerja 100% rumus perhitungan :

= (jumlah presentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah di tahun N) / (total presentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah)

$$= \frac{100 + 100 + 100}{100 + 100 + 100} \times 100 = 100,00\%$$

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh :

1. **Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** dengan indikator programnya adalah **Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah** dimana rumus perhitungannya:

$$\begin{aligned} &= \text{Persentase hasil pengadaan tanah} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2. **Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee** dengan indikator programnya adalah **Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee** dimana rumus perhitungannya:

$$\begin{aligned} &= \text{Persentase hasil redistribusi tanah dan ganti rugi tanah} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

3. Program Penatagunaan Tanah dengan indikator programnya adalah **Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota**, dimana rumus perhitungannya:

$$\begin{aligned} &= \text{Persentase hasil penggunaan tanah} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

1) **Kegiatan pengampu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** adalah:

Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi dengan target kinerja sebesar 1 Dokumen, terealisasi sebesar 1 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100,00\%$$

Kegiatan pengampu Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee adalah:

Kegiatan Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 2 Dokumen, terealisasi sebesar 2 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2}{2} \times 100 = 100,00\%$$

Kegiatan pengampu Program Program Penatagunaan Tanah adalah:

Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 2 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP terealisasi sebesar 2 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2}{2} \times 100 = 100,00\%$$

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja; tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022

- 1) Realisasi dan Capaian kinerja sasaran 1 untuk tahun 2023 pada 2 indikator diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Nilai Sakip, terjadi kenaikan realisasi kinerja setiap tahunnya dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Realisasi kinerja nilai SAKIP pada tahun 2023 sebesar 80,95 dengan capaian sebesar 99,94% (data sementara) artinya penerapan kinerja sudah berjalan dengan sangat baik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Indikator kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100	81		94,79	80,95		94,79	99,94	

- 2) Realisasi dan Capaian kinerja sasaran 2 untuk tahun 2023 pada 4 indikator diuraikan sebagai berikut:

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021
dan Tahun 2022

No .	Indikator kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	333,33	375,29		292,04	391,6		87,61	104,35	
2	Persentase Rumah Layak Huni	87,50	88,66		70,71	74,14		80,81	85,88	
3	Luasan permukiman kumuh			219			109,42		104,35	
4	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau			60,83			60,83			100
5	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU			9,73			99,53			108,51
6	Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan			100			100			100

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sama dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

- 1) Capaian kinerja sasaran 1 untuk tahun 2023 pada 2 indikator diuraikan sebagai berikut :

Indikator kinerja Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD yaitu Nilai Sakip Dinas Perumahan Rakyat dan Kaawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2023 adalah 80,95 (data sementara).

Pada tahun 2022 nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebesar 80,95 naik 2,20 % dari nilai SAKIP tahun 2021 yang sebesar 78,75. Jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah yang terdapat didalam Renstra Disperkim Tahun 2017-2022 sampai dengan tahun 2022 capaian Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebesar 99,44%.

Realisasi Kinerja Tahun 2022 yang merupakan akhir renstra dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017- 2022 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Realisasi kinerja tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah (2017-2022)	Rata-rata Realisasi s.d tahun ini (2017-2022)
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	81	80,95

Capaian kinerja tahun 2023 realisasi kinerjanya terdapat dalam renstra Dinas Perkim Tahun 2023-2026, namun saat belum ada nilainya.

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah (2023-2026)	Rata-rata Realisasi s.d tahun ini (2023-2026)
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Capaian SAKIP (Sistem	Nilai	70-80	...

	penyelenggaraan pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD			
--	------------------------------	--	--	--	--

2) Capaian kinerja sasaran 2 tahun 2023 pada 4 indikator sebagai berikut :

1. Luasan permukiman kumuh,
2. Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau,
3. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dan
4. Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan

Keempat indikator kinerja tersebut sudah sesuai dari target Jangka Menengah yang terdapat didalam Renstra Disperkim Tahun 2023-2026, ini menunjukkan bahwa perencanaan program dan kegiatan serta penerapan SPM sudah berjalan dengan baik sesuai target di dalam Renstra Disperkim Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkim Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 3.6

Tabel 3.6.

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkim Provinsi Banten Tahun 2013-2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah (2023-2026)	Rata-rata Realisasi s.d tahun ini (2023-2026)
1	Meningkatnya kualitas rumah, penataan	Luasan permukiman kumuh	Hektar	219	445,58
2	kawasan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang menghuni	Persen	60,83	60,83

	dan tata kelola pertanahan	rumah layak dan terjangkau			
3		Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	91,73	99,53
4		Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	100	100

Terdapat perubahan indikator kinerja dari renstra 2017-2022 dengan renstra 2023-2026, untuk tahun 2021 dan 2022 menggunakan renstra 2017-2022 sedangkan tahun 2023 menggunakan renstra 2023-2026. Perubahan indikator kinerja dengan masing-masing indikator setiap periode renstra definisi operasionalnya berbeda-beda dapat sebagai berikut:

1. Renstra 2027-2022 adalah Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani, sedangkan dalam Renstra 2023-2026 adalah Luasan permukiman kumuh
2. Renstra 2027-2022 adalah Persentase Rumah Layak Huni, sedangkan dalam Renstra 2023-2026 adalah Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau
3. Indikator kinerja Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU serta indikator kinerja Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan baru muncul pada renstra 2023-2026

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Sasaran, Program dan Kegiatan pada Dinas Perkim Provinsi Banten tidak ada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) makro sehingga tidak dapat membandingkan dengan kinerja nasional.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2023 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2023 antara lain:

- 1) Meningkatnya pemahaman pejabat struktural dan fungsional serta staf tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Kinerja telah dijabarkan (cascading) ke dalam kinerja setiap level jabatan dan staf
- 3) Tingginya minat SDM saat ini untuk memahami kinerja dan implementasinya
- 4) Mengikuti In House Training Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka peningkatan nilai SAKIP pada perangkat daerah
- 5) Mengikuti Workshop Implementasi SAKIP bagi Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah
- 6) Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam rangka meningkatkan kualitas laporan kinerja Perangkat Daerah
- 7) Melakukan tindak lanjut atas temuan inspektorat terkait LHP baik temuan administrasi maupun yang non administrasi
- 8) Melakukan In House Training terkait pembuatan SPJ dan penyesuaian rekening belanja lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk meminimalisir terjadinya temuan materiil maupun administrasi

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2022, yaitu :

- 1) Melakukan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat secara tepat waktu.
2. Program Pengembangan Perumahan
Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2023 antara lain:
 - 1) Tingginya perhatian dan komitmen pimpinan terhadap rumah korban bencana dan kemiskinan ekstrim, serta koordinasi dan kerjasama dengan BPD Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah berjalan dengan baik;
 - 2) Tersedianya data dan informasi terkait data penerima rumah korban bencana (*By Name By Addres*) di kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - 3) Tersedianya data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan (TKP2K) Provinsi Banten;
 - 4) Pembangunan rumah layak huni korban bencana alam Banjir Bandang sebanyak 2 unit di Kel. Kasemen, Kec. Kasemen Kota Serang dan Kel Margaluyu, Kec. Kasemen, Kota Serang;
 - 5) Terbangunnya rumah layak huni korban bencana alam pergerakan tanah di Desa Curug, Panjang Kec. Cikulur, Kab. Lebak sebanyak 56 unit rumah;
 - 6) Terbangunnya rumah layak huni korban bencana alam terdampak tsunami dan gempa bumi di Kabupaten Pandeglang sebanyak 62 unit rumah, yaitu di Kecamatan Carita sebanyak 2 Unit; Kecamatan Sumur sebanyak 20 unit; Kecamatan Cimanggu sebanyak 3 unit; Kecamatan Cigeulis 7 unit; Kecamatan Munjul sebanyak 4 unit; Kecamatan Picung sebanyak 4 unit; Kecamatan Patia sebanyak 2 unit; Kecamatan Cipeucang sebanyak 4 unit; Kecamatan Panimbang sebanyak 4 Unit; kecamatan Pagelaran sebanyak 1 Unit; Kecamatan Sobang sebanyak 1 unit; Kecamatan Cibaliung sebanyak 2 unit; Kecamatan Kadu hejo

sebanyak 6 unit; Kecamatan Mekarjaya sebanyak 1 unit; Kecamatan Majasari sebanyak 1 unit

- 7) Terbangunnya rumah korban bencana, Dinas Perkim juga melaksanakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat keimiskinan ekstrim sebanyak 78 unit rumah dengan menggunakan anggaran insentif pada anggaran perubahan 2023. Dari target 78 unit baru terbangun sebanyak 20 unit rumah dilokasi:
 - (1) Kec Warung Gunung: Ds. Jagabaya sebanyak 3 unit, Ds Cempaka sebanyak 1 unit, Ds Pasir Tangkil sebanyak 1 unit, Ds. Sukaraja sebanyak 1 unit, Ds. Sukarendah sebanyak 1 unit
 - (2) Kec. Kalanganyar, Ds Pasirkupa sebanyak 1 unit
 - (3) Kec. Menes: Ds. Sukamanah sebanyak 3 unit, Ds. Sindangkarya sebanyak 3 unit, Ds. Ramaya sebanyak 2 unit, Ds. Cigandeng sebanyak 2 unit
 - (4) Kec. Kroncong, Ds. Pasirkarang sebanyak 2 unit
- 8) Mengikuti Bimbingan Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
- 9) Melakukan Rapat Pokja PKP setiap triwulan untuk membahas permasalahan dan solusi serta upaya penyelesaian terkait bidang perumahan dan Kawasan permukiman

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja sasaran pada tahun 2023, yaitu:

- (1) Melaksanakan selain urusan wajib yang ditetapkan dalam SPM Perumahan Rakyat, juga melaksanakan tugas yang mendukung bidnagnya yaitu pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat kemiskinan ekstrim yang diampu oleh Program Pengembangan Perumahan, Adapun metode pelaksanaan pembangunan menggunakan metode RISHA. Data BNBA (*By Name BY Addres*) yang

dipergunakan dalam melaksanakan penerima rumah layak huni adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

- (2) Melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat keimiskinan ekstrem sebanyak 78 unit rumah, namun hanya terbangun sebanyak 20 unit rumah disebabkan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi (Perubahan). Upaya penyelesaiannya sisa RISHA yang sudah tercetak di workshop Dinas Perkim dan menjadi stock opname/persediaan untuk dibangun tahun 2024
- (3) Melakukan ecalasi terhadap rumah layak huni bagi korban bencana menggunakan metode RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana), RISHA didesain untuk rumah tahan gempa yang merupakan metode pembangunan rumah dengan teknologi pracetak atau precast. Dengan menggunakan RISHA maka pembangunan rumah layak huni dapat dibangun lebih cepat dan aman, namun diupayakan untuk menggunakan teknologi lainnya yaitu RUSPIN selinn aman juga dengan harga yang lebih murah
- (4) Melakukan pelatihan terhadap tukang yang mencetak RISHA dengan tenaga ahli dari PUSKIM Bandung, peserta pelatihan diberikan sertifikat dan bekerja di Workshop yang dimiliki oleh Dinas Perkim Provinsi Banten

3. Program Kawasan Permukiman

Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2023 antara lain:

- (1) Tingginya perhatian dan komitmen pimpinan terhadap kesepakatan penetapan lokasi Kawasan kumuh kewenangan Provinsi 10 Ha s.d dibawah 15 Ha dengan kabupaten/kota yang akan ditangani;
- (2) Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan kabupaten/kota berjalan dengan baik;

- (3) Perencanaan dan pelaksanaan yang matang dan fokus dalam pencapaian target kinerja;
- (4) Tersedianya data dan informasi lokasi Kawasan kumuh kewenangan Provinsi 10 Ha s.d dibawah 15 Ha;
- (5) Adnya Peraturan Gubernur Banten tentang RP3KP Provinsi Banten sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan perumahan dan Kawasan permukiman
- (6) Adanya Standar Opersional Prosedur Perumahan Kumuh dan Pemrukiman Kumuh kewenangan provinsi
- (7) Adanya kesepakatan kumuh dengan Kabupaten/Kota sebagai dasar penetapan lokasi kumuh yang akan ditangani provinsi yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Kumuh
- (8) Tersusunnya dokumen perencanaan grand design Kawasan kumuh kewenangan provinsi berdasarkan SK Kumuh Bupati/Walikota
- (9) Mengadakan konsultasi publik terkait penanganan Kawasan kumuh dengan mengundang pemerintah desa dan kabupaten/kota
- (10) Tercapainya hasil pembangunan peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan seluas 109,42 Ha sesuai target kinerja, namun ketercapaian anggaran tidak 100%.

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja sasaran pada tahun 2023, yaitu:

- (1) Melakukan evaluasi program dan kegiatan secara berkala setiap triwulan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait capaian kinerja program dan kegiatan tahun berjalan serta mengungkap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut
- (2) Melakukan tindak lanjut setiap permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan menjadi catatan untuk kegiatan tahun berikutnya agar lebih cermat dalam perencanaannya.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2023 antara lain:

- (1) Tingginya perhatian dan komitmen pimpinan terhadap penetapan lokasi pembangunan PSU
- (2) Koordinasi dan sinergitas dengan kabupaten/kota berjalan dengan baik
- (3) Tersedianya data dan informasi lokasi prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
- (4) Tersusunnya dokumen perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman
- (5) Terlaksananya peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum di wilayah Kota Tangerang sebanyak 94 lokasi, Kabupaten Tangerang sebanyak 415 lokasi, Kota Tangerang Selatan sebanyak 128 lokasi, Kota Cilegon sebanyak 6 lokasi, Kota Serang 131 Lokasi, Kabupaten Serang sebanyak 319 Lokasi, Kabupaten Pandeglang sebanyak 307 lokasi dan Kabupaten Lebak sebanyak 210 lokasi, Dengan demikian untuk Se-Provinsi Banten sebanyak 1610 lokasi dengan melaksanakan beberapa pekerjaan, antara lain:
 - a. Drainase Lingkunganya sebanyak 226 unit
 - b. Jalan Lingkungan di 1299 lokasi
 - c. MCK sebanyak 31 unit
 - d. Balai Warga sebanyak 54 unit
 - e. Jamban sebanyak 230 unit, Stock 120 unit dari target 350 unitKetercapaian anggaran tidak 100%, adanya efesiensi anggaran namun ketercapaian kinerja telah tercapai.

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja sasaran pada tahun 2023, yaitu:

- (1) Diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas untuk menetapkan lokasi pembangunan peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum
 - (2) Mengadakan rekon data PSU Permukiman untuk memantapkan keakuratan data sehingga ketika nantinya dilakukan pelaksanaan konstruksi tidak terjadi kesalahan lokasi pekerjaan.
 - (3) Mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi pendataan berbasis online sebagai tools dalam monitoring dan evaluasi pekerjaan peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2023 antara lain:
1. Tingginya perhatian dan komitmen pimpinan terhadap sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan Kualifikasi Menengah;
 2. Koordinasi dan sinergitas dengan asosiasi pengembang perumahan;
 3. Koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Penyediaan Infrastruktur, Kementrian PUPR terkait aplikasi SIRENG dan SIKUMBANG
 4. Tersedianya data dan informasi terkait data pengembang perumahan yang tersertifikasi, teregistrasi dan telah mengikuti pelatihan dan penyuluhan;
 5. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dengan peserta dari Kab/Kota, Asosiasi Perumahan dan Pengembang Perumahan yang dibagi menjadi:
 - 1) WKP I meliputi wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023, di Hotel Golden Tulip, Kota Tangerang sebanyak 100 peserta;

- 2) Rapat Koordinasi Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023, di Hotel Le Semar, Kota Serang; sebanyak 50 peserta;
- 3) WKP II dan III meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023, di Hotel Forbis, Kabupaten Serang sebanyak 100 peserta.

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja sasaran pada tahun 2023, yaitu:

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Ditjen. Penyediaan Infrastruktur, Kementerian PUPR selaku pengelola aplikasi SIRENG dan SIKUMBANG sebagai tools dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengembang perumahan
 - 2) Melaksanakan rapat koordinasi sebagai sharing informasi terkait permasalahan pada pengembang perumahan dengan mengundang pengembang perumahan, asosiasi pengembang dan dinas terkait kabupaten/kota
 - 3) Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi pengembang perumahan sambil menunggu revisi peraturan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan
 - 4) Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan secara berkala setiap triwulan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait capaian kinerja program dan kegiatan tahun berjalan serta mengungkap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut
6. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2023 antara lain:

- a. Tingginya perhatian dan komitmen pimpinan terhadap penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- b. Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan kabupaten/kota berjalan dengan baik;
- c. Tersedianya data dan informasi terkait pertanahan di kabupaten/kota
- d. Tersusunnya dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- e. Terbitnya Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penetapan lokasi pembangun untuk kepentingan umum
- f. Terlaksananya penetapan lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi kepentingan umum sebanyak 6 Lokasi, yaitu : Penetapan Lokasi akses Tol Serbaraja, Penetapan Lokasi Tol Tangerang-Merak (Perpanjangan Penlok Thp. II dan III), Penetapan Lokasi Tol Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran (Perpanjangan Penlok), Penetapan Lokasi KAI (SK. Gub Kerohiman), Penetapan Lokasi Tol Serang - Panimbang (Perpanjangan Penlok)

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja sasaran pada tahun 2023, yaitu :

- a. Melakukan Konsultasi Publik terkait pengadaan tanah dengan mengundang masyarakat yang tanahnya akan mejadi lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
- b. Mengadakan pemberian Uang Ganti Kerugian atas Tanah masyarakat yang menjadi lokasi pembangun untuk kepentingan umum

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja Sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan, dengan 4 indikator yaitu 1) Luasan permukiman kumuh, 2) Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau, 3) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dan 4) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan. Program yang mendukung Pencapaian Sasaran 2 (Dua) Sebanyak 8 (Delapan) Program Diantaranya Adalah 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Anggaran Rp. 31.662.335.066,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 28.439.736.502,- Dengan Persentase 89,82%, 2) Program Pengembangan Perumahan Dengan Anggaran Rp. 28.885.309.500,- Realisasi Anggaran Sebesar 25.690.588.228,- Dengan Persentase 88,94%, 3) Program Kawasan Permukiman Dengan Anggaran Rp. 76.102.227.661,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 69.305.987.492,- Dengan Persentase 91,07%, 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dengan Anggaran Rp. 348.460.606.973,- Realisasi Anggaran Sebesar 329.209.662.774,- Dengan Persentase 94,48%, 5) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Anggaran Rp. 481.769.600,- Realisasi Anggaran Sebesar 384.804.974,- Dengan Persentase 79,87%, 6) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Anggaran Rp. 88.464.100,- Realisasi Anggaran Sebesar 31.900.000,- Dengan Persentase 36,06%, 7) Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dengan Anggaran Rp. 176.928.200,- Realisasi Anggaran Sebesar 38.263.945,- Dengan Persentase 21,63%, 8) Program Penatagunaan Tanah dengan anggaran Rp. 174.555.500,- realisasi anggaran sebesar 34.645.000,- dengan persentase 19,85%.

Rata rata capaian realisasi anggaran dari 8 program yang mendukung pencapaian sasaran 2 sebesar 65,21%. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tergambar bahwa Pencapaian indikator kinerja pada Program

Pengembangan Perumahan dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, yaitu capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan anggaran. Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya pada sasaran 2 sebesar 88,94% sedangkan capaian kinerja sebesar 108,66%. Capaian kinerja program pengembangan perumahan melebihi target kinerjanya dikarenakan target kinerja sub kegiatan tahun 2023 yaitu 120 unit rumah sedangkan target renstra yaitu 100 unit. Selain itu terdapat capaian kinerja pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sebanyak 30 unit yang mendukung capaian indikator Gubernur. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan			Target			Realisasi		Capaian		Efesienasi
			Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					31.662.335.066,00		28.439.736.502,00		89,82	10,18
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00	%	1.553.470.000,00	100,00	1.393.036.042,00	100,00	89,67	10,33
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	626.750.300,00	2	542.888.520,00	100,00	86,62	13,38
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	10.000.000,00	2	9925940,00	100,00	99,26	0,74
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	10.000.000,00	2	9925940,00	100,00	99,26	0,74

	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	17.900.000,00	2	16925940,00	100,00	94,56	5,44
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	10.000.000,00	2	9925940,00	100,00	99,26	0,74
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	593.917.000,00	12	549.495.600,00	100,00	92,52	7,48
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	284.902.700,00	4	253.948.162,00	100,00	89,14	10,86
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	16.214.394.800,00	100,00	15.362.050.973,00	100,00	94,74	5,26
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	696	Orang/Bulan	14.987.000.000,00	696	14.220.987.573,00	100,00	94,89	5,11

	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	615.000.000,00	12	581.255.000,00	100,00	94,51	5,49
	10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	500.000.000,00	12	451.850.750,00	100,00	90,37	9,63
	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	10.000.000,00	12	9.895.950,00	100,00	98,96	1,04
	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	15.000.000,00	1	15.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	13	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	5.000.000,00	1	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	18	Laporan	72.394.800,00	18	68.071.800,00	100,00	94,03	5,97

			an/Semesteran SKPD								
	1 5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	10.000.000,00	1	9.989.900,00	100,0 0	99,90	0,1
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	%	426.288.400,00	83,33	220.039.297,00	83,33	51,62	48,38
	1 6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	50.000.000,00	1	11.503.002,00	50,00	23,01	76,99
	1 7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	44.828.400,00	1	44.345.845,00	100,0 0	98,92	1,08
	1 8	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	209.960.000,00	1	86.740.450,00	100,0 0	41,31	58,69
	1 9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	1	Laporan	15.000.000,00	1	12.600.000,00	100,0 0	84,00	16

			Milik Daerah pada SKPD								
	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	106.500.000,00	1	64.850.000,00	100,00	60,89	39,11
4		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100	%	482.584.400,00	100,00	348.843.200,00	100,00	72,29	27,71
	21	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Unit	0,00	0	-	0,00	0,00	0,00
	22	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	164.350.400,00	3	162.392.000,00	100,00	98,81	1,19
	23	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	15.000.000,00	1	9.780.000,00	100,00	65,20	34,8
	24	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	204.584.000,00	1	153.715.000,00	100,00	75,14	24,86
	25	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	88.650.000,00	2	22.956.200,00	100,00	25,90	74,1

	26	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang	10.000.000,00	0	-	0	0,00	
	27	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	0,00	0	0	0	#DIV/0!	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	100	%	3.444.714.228,00	100,00	3.006.558.015,00	100,00	87,28	12,72
	28	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	200.000.000,00	4	186.024.753,00	100,00	93,01	6,99
	29	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	888.509.400,00	16	793.918.397,00	100,00	89,35	10,65
	30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	20.176.000,00	4	19.024.000,00	100,00	94,29	5,71
	31	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	100.000.000,00	2	83.144.500,00	100,00	83,14	16,86

	3 2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	50.000.000,00	1	45.705.000,00	100,0 0	91,41	8,59
	3 3	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	164	Paket	1.609.150.400,00	164	1.510.447.200,00	100,0 0	93,87	6,13
	3 4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	57.450.000,00	1	47.017.294,00	100,0 0	81,84	18,16
	3 5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	297.628.428,00	1	174.459.500,00	100,0 0	58,62	41,38
	3 6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	163.000.000,00	1	109.269.550,00	100,0 0	67,04	32,96
	3 7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	58.800.000,00	1	37.547.821,00	100,0 0	63,86	36,14
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	2.430.344.100,00	46,15	1.991.899.950,00	46,15	81,96	18,04
	3 8	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	2	Unit	1.891.746.000,00	2	1.699.545.950,00	100,0 0	89,84	10,16

		Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan								
	3 9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37	Unit	538.598.100,00	16	292.354.000,00	43,24	54,28	45,72
7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	4.450.506.538,00	100,00	4.145.853.585,00	100,00	93,15	6,85
	4 0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	25.056.000,00	12	22.002.900,00	100,00	87,81	12,19
	4 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	349.345.600,00	12	349.341.417,00	100,00	100,00	0
	4 2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	50.000.000,00	12	29.989.900,00	100,00	59,98	40,02
	4 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.026.104.938,00	12	3.744.519.368,00	100,00	93,01	6,99
8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100	%	2.660.032.600,00	82,48	1.971.455.440,00	82,48	74,11	25,89

	Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah								
	4 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17	Unit	200.000.000,00	17	141.347.600,00	100,0 0	70,67	29,33
	4 5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	Unit	1.138.670.000,00	56	848.864.900,00	100,0 0	74,55	25,45
	4 6	Sub Kegiatan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	376	Unit	446.362.600,00	297	128.870.100,00	78,99	28,87	71,13
	4 7	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	Unit	575.000.000,00	1	555.399.940,00	100,0 0	96,59	3,41
	4 8	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1	Unit	300.000.000,00	1	296.972.900,00	100,0 0	98,99	1,01

		Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi								
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					28.885.309.500,00		25.690.588.228,00		88,94	11,06	
1	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Persentase Ketercapaian Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	9	Dokumen	1.425.085.600,00	9	1.339.424.985,00	#REF !	93,99	6,01
	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	3	Dokumen	325.600.000,00	3	322.233.906,00	100,00	98,97	1,03
	2	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2	Dokumen	625.600.000,00	2	607.915.906,00	100,00	97,17	2,83
	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	Dokumen	100.000.000,00	1	79.069.559,00	100,00	79,07	20,93

		yang Belum Tertangani									
	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	Dokumen	100.000.000,00	1	79.569.559,00	100,00	79,57	20,43
	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	1	Dokumen	100.000.000,00	1	79.784.119,00	100,00	79,78	20,22
	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	Dokumen	173.885.600,00	1	170.851.936,00	100,00	98,26	1,74
2		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	50	Orang	244.440.000,00	50	241.596.452,00	#REF!	98,84	1,16

	7	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	50	Orang	244.440.000,00	50	241.596.452,00	100,00	98,84	1,16
3	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	%	27.077.512.900,00	100,00	23.980.512.057,00	100,00	88,56	11,44
	8	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	11	Dokumen	1.307.065.400,00	11	1.276.444.906,00	100,00	97,66	2,34
	9	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	120	Unit Rumah	18.449.531.500,00	120	16.054.330.747,00	100,00	87,02	12,98
	10	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	262	Unit Rumah	7.320.916.000,00	262	6.649.736.404,00	100,00	90,83	9,17
4	Kegiatan Pendistribusian dan		Persentase Ketercapaian	1	Dokumen	138.271.000,00	1	129.054.734,00	100,00	93,33	6,67

	Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								
	1 1	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1	Dokumen	138.271.000,00	1	129.054.734,00	100,00	93,33	6,67
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						76.102.227.661,00		69.305.987.492,00		91,07	8,93
1	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Persentase Ketercapaian Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	6	Dokumen	2.359.255.350,00	5	1.951.274.121,00	#REF!	82,71	17,29
	1	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	Laporan	91.384.300,00	1	66.205.900,00	100,00	72,45	27,55
	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat	2	Dokumen	111.320.050,00	1	52.781.000,00	50,00	47,41	52,59

		Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh								
	3	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1	Dokumen	2.031.451.000,00	1	1.725.093.840,00	100,00	84,92	15,08
	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	Laporan	125.100.000,00	2	107.193.381	100,00	85,69	14,31
2		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	100	%	73.742.972.311,00	100,00	67.354.713.371,00	100,00	91,34	8,66
	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan	10	Dokumen	3.886.138.500,00	10	3.739.827.470,00	100,00	96,24	3,76

		Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15(Lima Belas) Ha	di Bawah 15 (Lima Belas) Ha								
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	19	Laporan	4.657.045.900,00	19	3.703.412.500,00	100,00	79,52	20,48
	3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha	247	Unit Rumah	17.261.060.025,00	247	16.730.011.433,00	100,00	96,92	3,08

		(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki								
	4	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	109,42	Ha	47.938.727.886,00	109,42	43.181.461.968,00	100,00	90,08	9,92
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						348.460.606.973,00		329.209.662.774,00		94,48	5,52
1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	100	%	348.460.606.973,00	99,59	329.209.662.774,00	99,59	94,48	5,52
	1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	17	Dokumen	2.577.810.680,00	17	2.439.636.067,00	100,00	94,64	5,36
	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1919	Lokasi	318.589.274.179,00	1910	302.332.587.934,00	99,53	94,90	5,1

	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	242	Laporan	27.293.522.114,00	242	24.437.438.773,00	100,00	89,54	10,46
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						481.769.600,00		384.804.974,00		79,87	20,13
1	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah		1	Laporan	481.769.600,00	1	384.804.974,00	100,00	79,87	20,13
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan	1	Laporan	481.769.600,00	1	384.804.974,00	100,00	79,87	20,13

		Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah								
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					88.464.100,00		31.900.000,00		36,06	63,94	
1	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		Persentase Ketercapaian kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	1	Dokumen	88.464.100,00	1	31.900.000,00	100,00	36,06	63,94
	1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1	Dokumen	88.464.100,00	1	31.900.000,00	100,00	36,06	63,94
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					176.928.200,00		38.263.945,00		21,63	78,37	

1	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	Dokumen	176.928.200,00	2	38.263.945,00	100,00	21,63	78,37
	1	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	88.464.100,00	1	19.695.945,00	100,00	22,26	77,74
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1	Berita Acara	88.464.100,00	1	18.568.000,00	100,00	20,99	79,01
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						174.555.500,00		34.645.000,00		19,85	80,15
1	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang	2	Dokumen	174.555.500,00	2	34.645.000,00	100,00	19,85	80,15

	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1	Laporan	86.091.400,00	1	14.600.000,00	100,00	16,96	83,04
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	88.464.100,00	1	20.045.000,00	100,00	22,66	77,34

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan pencapaian semua sasaran strategis sebanyak 8 program dan 19 kegiatan. Adapun pencapaian atas kinerja dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

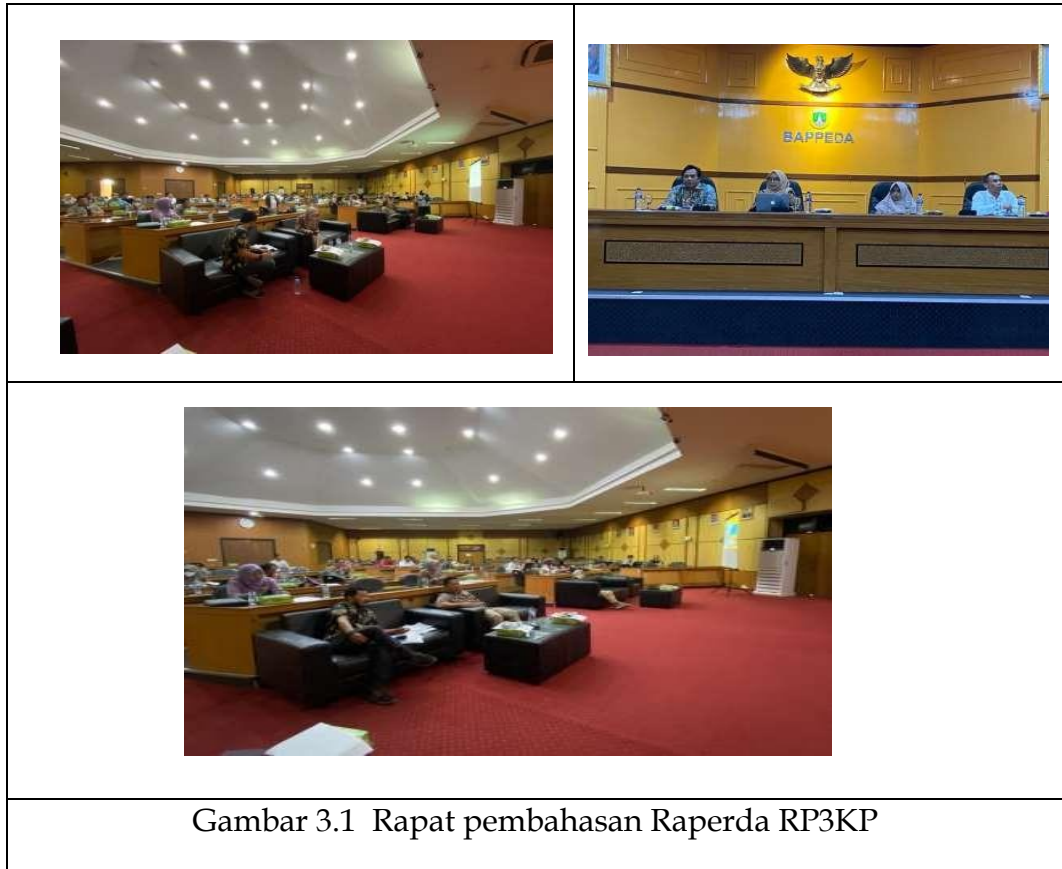
1. Program Kawasan Permukiman

- 1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan capaian kinerja sebesar 83,33%

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

- (1) Pelaksanaan Bintek Pengelolaan Sampah bagi BKM dan Masyarakat Terdampak Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Cilegon telah selesai
 - (2) Sub kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaraan/Peremajaan Permukiman Kumuh target tidak tercapai karena;
 1. Kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah Koordinasi terkait RP3KP ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
 2. Peresmian Kawasan Kumuh di Provinsi Banten tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pekerjaan fisik selesai akhir Desember sehingga untuk penatausahaan serah terima waktunya tidak mencukupi.
 - (3) Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP adalah pekerjaan Penyusunan Review Dokumen RP3KP Provinsi Banten dan Penyusunan Raperda tentang RP3KP Provinsi Banten
- Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Kunjunga Kerja ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Penyusunan Review RP3KP
- c. Penyusunan Draft Raperda RP3KP





Gambar 3.2 Rapat Penyusunan Review Dokumen RP3KP



Gambar 3.3 Rapat Koordinasi/ Kunjungan Kerja Ke Kalimantan Selatan

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:
 - a. Pelaksanaan rapat kesepakatan Kawasan kumuh di Kota Tangerang Selatan
 - b. Updating Data Kawasan Kumuh WKP I masih dalam proses penyusunan

- g. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, terealisasi sebesar 100%.

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

- (1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah penyusunan DED di:

1. Kawasan Permukiman Kumuh Desa Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak
 2. Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak
 3. Kawasan Permukiman Kumuh Desa Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak
 4. Kawasan Permukiman Kumuh Desa Cimangeunteung Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak
 5. Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Kranggan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan
 6. Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pejamben Kec. Carita Kab. Pandeglang
 7. Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sindanglaut Kec. Carita Kab. Pandeglang
 8. Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang
 9. Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Pabean Kec. Purwakarta Kota Cilegon
 10. Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Sukajaya, Kel. Kemanisa, Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang
- (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah:
1. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Banjarmasin Kec. Carita Kab. Pandeglang

2. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajadi Kec. Carita Kab. Pandeglang
3. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang
4. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang
5. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Tembong Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
6. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang
7. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang
8. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang
9. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang
10. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan
11. Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Banjarmasin Kec. Carita Kab. Pandeglang
12. Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sukajadi Kec. Carita Kab. Pandeglang
13. Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang

14. Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kp. Reforma Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang
 15. Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang
 16. Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Tembong Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
 17. Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang
 18. Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang
 19. Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang
- (3) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah:
1. Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang sebanyak 15 Unit
 2. Desa Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang sebanyak 10 Unit
 3. Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang sebanyak 35 unit
 4. Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang sebanyak 30 unit
 5. Desa Banjarmasin Kec. Carita Kab. Pandeglang sebanyak 52 unit
 6. Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang sebanyak 6 unit
 7. Kelurahan Tembong Kec. Cipocok Jaya Kota Serang sebanyak 10 unit
 8. Desa Sukajadi Kec. Carita Kab. Pandeglang sebanyak 54 unit

1. Abdurahman	
	
2. Agus Sugianto	
	
3. Amah	
	
4. Daniah	
	
Gambar 3.4 Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman kumuh di Desa Carita Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang	

(4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, lokasi pekerjaan adalah:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang seluas 2,24 Ha.
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang seluas 14,50 Ha. Pekerjaan Fisik yang dilaksanakan adalah Jalan Paving Blok 5981 M², Saluran U-Ditch 1.234 Unit, MCK 1 unit, Sarana Air Bersih (SAB) 2 titik, PJU sebanyak 21 Unit, TPT 26,25 m³, tempat sampah sebanyak 26 unit.
3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Banjarmasin Kec. Carita Kab. Pandeglang seluas 10, 37 Ha. Pekerjaan Fisik yang dilaksanakan adalah U-ditch dan Box Culvert, Bangunan MCK Tipe 1, Bangunan Serba Guna, Bangunan Lapangan Volly RTP, bangunan Lapangan Volly Warga, Bangunan Lapangan Badminton, Bangunan Track Terapi, Bangunan Bak Sampah Sederhana, Bangunan Pagar, PJU Solar Panel, Signage, Pohon, Playground, Alat Fitness, Kanopi Tempat Duduk, Saluran Air, TPT (Tembok Penahan Tanah).
4. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang seluas 12,21 Ha. Pekerjaan Fisik yang dilaksanakan adalah Jalan Paving Block 305,42 M², Pagar 828,51 M', Gapura 4 Unit, Sarana Air Bersih (SAB) 1 Unit, MCK 6 Unit, Drainase (Saluran) 97,91 M³, Pintu Gerbang 4 Unit, Jalan Rigid (Beton) 1.152,50 M'.
5. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang seluas 11,00 Ha. Pekerjaan Fisik yang dilaksanakan adalah Jalan Rigid (Beton) 891,50 M', Jalan Paving Block 3.051,23 M², Saluran U Ditch 1.434 M'.

6. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang (Tahap 2) seluas 10,55 Ha. Pekerjaan Fisik yang dilaksanakan adalah Jalan Rigid (Beton) 891,50 M, Jalan Paving Block 3.051,23 M², Saluran U Ditch 1.434 M, Saluran Beton Precast, Box Culvert, MCK, PJU Solar Panel.
7. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Tembong Kec. Cipocok Jaya Kota Serang seluas 10,09 Ha. Pekerjaan Fisik yang dilaksanakan adalah Pekerjaan Fisik yang dilaksanakan adalah Balai Warga 3 unit, Saluran U-Ditch 2517 unit, Gapura 3 unit, Paving Block 3390,80 M², MCK 3 unit, SAB 2 unit, Pagar 194,8M
8. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang seluas 15 Ha. Pekerjaan Fisik yang dilaksanakan adalah Paving Block 951,40 M, Drainase Lingkungan U-Ditch 2.545,2 M, Sarana Air Bersih 1 unit, Penerangan Jalan Umum 37 titik, Gapura 2 unit.
9. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan seluas 10,86 Ha.
10. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajadi Kec. Carita Kab. Pandeglang seluas 12,60 Ha.

Dokumentasi hasil pekerjaan fisik yang dilaksanakan adalah:

Nama Pekerjaan	Pekerjaan Fisik yang dilaksanakan	Dokumentasi	
		0%	100%
Drainase Lingkungan	U-ditch dan Box Culvert		

Bangunan Gedung Sederhana (Ruang Baca)	Bangunan Gedung Sederhana Ruang Baca		
Bangunan Gedung Sederhana dan Lansekap	1. Bangunan MCK Tipe 1;2. Bangunan Serba Guna;3. Bangunan Lapangan Volly RTP;4. Bangunan Lapangan Volly Warga;5. Bangunan Lapangan Badminton;6. Bangunan Track Terapi;7. Bangunan Bak Sampah Sederhana;8. Bangunan Pagar;9. PJU Solar Panel;10. Signage;11. Pohon;12. Playground;13. Alat Fitness;14. Kanopi Tempat Duduk;15. Saluran Air;16. TPT (Tembok Penahan Tanah).		
			
			
			
			

Jalan Lingkungan Paving Block	Paving Block		
Bangunan Gedung Sederhana (Bangunan MCK Tipe 2)	MCK Tipe 2		
Jalan Lingkungan Beton Ready Mix	Jalan Beton Ready Mix		

Gambar 3.5 Peningkatan Kualitas Kawasan kumuh di Desa Banjarmasin Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

- ✚ Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
- ✚ Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- ✚ Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja
- ✚ Tersedianya data Kawasan kumuh kewenangan provinsi yang telah ditetapkan dalam SK. Kumuh Bupati/Walikota serta adanya kesepakatan Bersama dengan Kabupaten/Kota dalam penenangan kumuh di Provinsi Banten yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi 10 s.d dibawah 15 Ha.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

- ✚ Sasaran dengan indikator Luasan Kawasan Kumuh yang ditata diampu oleh Program Kawasan Permukiman dimana realisasi sampai dengan bulan Desember telah tercapai 100%, namun pekerjaan tidak sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan karena adanya perubahan mekanisme pengadaan menjadi e katalog
- ✚ Beberapa Kabupaten/Kota dalam menetapkan Kawasan kumuh hanya kewenangan Kabuapten/Kota yaitu dibawah 10 Ha, sehingga beberapa Kabupaten/Kota tidak dapat diintervensi karena keterbatasan kewenangan. Namun Kabupaten/Kota dengan keterbatasan anggaran mengajukan usulan ke Provinsi agar Kawasan kumuh kewenangannya ditangani oleh Provinsi
- ✚ Salah satu indikator kekumuhan adalah Bangunan Gedung (Rumah Tidak Layak Huni). Provinsi dalam menangani Kawasan kumuh sesuai kewenangan, namun kenyataan di lapangan terdapat RTLH yang harus ditangani karena kondisi sudah rusak berat (tidak layak untuk ditempati) tidak dapat diperbaiki.
- ✚ Selama ini Dinas Perkim dalam menangani kawasan kumuh hanya sesuai kewenangan, di luar kewenangan belum bisa ditangani karena belum ada kesepakatan baik dari perencanaan maupun mekanisme penganggarannya.

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

- ✚ Lebih cermat dalam menyusun Dokumen Rencana Kegiatan
- ✚ Lebih intensif dalam berkonsultansi dengan pimpinan dan Perangkat Daerah yang membidangi pengadan barang/jasa dalam hal metode

pengadaan yang akan digunakan, sehingga bisa mempersiapkan Lebih awal dan lebih teliti mempersiapkan dokumen sebagai bahan pengadaan

- ✚ Akan segera mempersiapkan dokumen lelang, terutama dokumen HPS, KAK, RAB dan Surat Pengantar dari Kepala Dinas lebih awal atau sesuaikan dengan rencana jadwal pelaksanaan
- ✚ Lebih awal dalam melakukan survey harga dan upah sebagai dasar dalam penyusunan HPS
- ✚ Akan lebih intensif dalam berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mendorong agar dalam mendelineasi dan menetapkan luasan Kawasan kumuh terdapat kewenangan provinsi 10 s.d dibawah 15 Ha dalam satu hamparan, agar provinsi, bisa mengintervensi
- ✚ Akan berkoordinasi dengan Tim TAPD terkait dengan penanganan Kawasan kumuh di luar kewenangan provinsi agar provinsi bisa mengintervensi, dengan prioritas Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin.

2. Program Perumahan

Kegiatan pengampu program Pengembangan Perumahan adalah:

1. **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**, dengan target kinerja sebesar 6 Dokumen, terealisasi sebesar 6 Dokumen.

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
2. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi di WKP 1 Tahun 2023
3. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi di WKP 2 Tahun 2023

4. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi di WKP 3 Tahun 2023
 5. Feasibility Study (FS) Lahan-lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Korban Bencana dan atau Relokasi Program Provinsi
 6. Identifikasi Lahan-lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Program Provinsi Tahun 2023
 7. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani Tahun 2023
 8. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 9. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Provinsi Tahun 2023
 10. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Tahun 2023
- 2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi,** dengan target kinerja sebesar 50 Orang, terealisasi sebesar 50 Orang.
- Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :
1. Pelaksanaan rapat koordinasi Pembentukan Dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendampingan Dan Fasilitator dengan Dinas terkait Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi Banten.
- 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi,** dengan target kinerja sebesar 100,00%, terealisasi sebesar 100,00%.
- Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :
- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pekerjaan yang dilaksanakan adalah:
 - (1) DED Infrastruktur Penunjang Huntap Desa Curug Bitung Kecamatan Candi

- (2) DED Infrastruktur Penunjang Huntap Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang
 - (3) DED Penunjang Drainase Huntap Desa Sumber Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang
 - (4) DED Rumah Bencana Di Kabupaten Lebak Dan Pandeglang
 - (5) Penyusunan DED Workshop Dprkp Di Kp3b
 - (6) DED Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Desa Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak
 - (7) DED Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang
 - (8) DED Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Desa Sumber Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang
 - (9) DED Pagar Kawasan Rencana Workshop DPRKP di Kelurahan Kemanisan Kec. Curug Kota Serang
 - (10) Updating DED Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Kec. Labuan Kab. Pandeglang
 - (11) Penyusunan Dokumen Lingkungan Rencana Workshop DPRKP di Kelurahan Kemanisan Kec. Curug Kota Serang
 - (12) Masterplan Rumah Bagi Korban Bencana dan atau Terdampak Relokasi Program Provinsi
 - (13) Penyusunan Tipologi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi WKP 1
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, pekerjaan pembangunan rumah bencana sebanyak 120 unit rumah di lokasi:
1. Rumah Korban Bencana Gerakan Tanah di KP. Cihuni 009/002 Desa Curug Panjang Cikulur Kab. Lebak sebanyak 56 unit rumah yang direlokasi ke Desa Curug Panjang Kec. Cikulur Kabupaten Lebak
 2. Rumah Rusak Berat Terdampak Tsunami Dan Gempa Bumi Di Kabupaten Pandeglang sebanyak 62 unit rumah

3. Rumah rusak berat terdampak banjir di Kel Kasemen, Kec. Kasemen, Kota Serang sebanyak 2 unit rumah
4. Tambahan anggaran perubahan yaitu dana insentif untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kemiskinan ekstrim sebanyak 78 unit rumah.

Nama Penrima	Alamat	Dokumentasi	
Misrani	Kp.Cihoe 001 /005, Ds. Kertamukti, Kec Sumur, Kab. Pandeglang		
Iyon/Ene	Kp.Cihoe 001/ 005, Kertamukti, Kec Sumur, Kab. Pandeglang		
Ranah	Kp. Cihoe 001/ 005, Kertamukti, Kec Sumur, Kab. Pandeglang		
Yano	Kp.Ciputih 003 /005, Kertamukti, Kec Sumur, Kab. Pandeglang		
Rohman	Kp.Polos 001/00, Kertamukti, Kec Sumur, Kab. Pandeglang		

Gambar 3.6 Hasil Pembangunan Rumah Korban Bencana Terdampak Tsunami dan Gempa Bumi

3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pekerjaan yang dilaksanakan adalah:

1. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Banyumekar Kec. Labuan Kab. Pandeglang
2. Pembangunan Infrastruktur penunjang hunian tetap Kec. Sajira Kab. Lebak

4. **Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**, dengan dengan capaian kinerja 100%

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

- 1) Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi, bertempat Kantor Desa Curug Panjang Kec. Cikulur Kabupaten Lebak



- 2) Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi, bertempat Kantor Desa Curug Panjang Kec. Cikulur Kabupaten Lebak



- 3) Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi, bertempat di Kantor Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang



Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

- + Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
- + Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- + Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja
- + Tersedianya up dating data rumah bagi korban bencana dan data kemiskinan *By Name By Addres* (BNBA) sebagai dasar dalam perencanaan
- + Terlaksanakan verifikasi dan validasi penerima rumah layak huni bagi korban bencana, sehingga dalam pembangunan rumah korban bencana tepat sasaran. Karena dari target yang ditentukan dalam renstra dengan seiringnya waktu terdapat rumah yang sudah dibangun/diperbaiki sendiri atau oleh pihak lain, selain itu terdapat juga rumah yang bukan rumah milik sehingga tidak dapat di tangani.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

- + Proses Probity Audit sampai Laporan Hasil Probity Audit waktunya lama yaitu dari bulan April – Juni 2023 (3 Bulan)
- + Verifikasi dilaksanakan setelah selesai Probity Audit sehingga baru dapat dilakukan akhir Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 (2 bulan)

- ✚ Keterlambatan pada Proses audit yang dilanjutkan dengan verifikasi yang memperlambat waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan RISHA baru dapat dimulai bulan Agustus 2023
- ✚ Kurangnya tukang (cetak panel dan erection) yang handal dan telah memiliki sertifikat memperlambat dalam pelaksanaan pembangunan RISHA
- ✚ Kurangnya ketertarikan sebagai aplikator menyebabkan kurangnya mendapatkan RISHA di Wilayah Provinsi Banten, sehingga menghambat capaian pembangunan rumah layak huni dengan menggunakan RISHA
- ✚ Adanya rumah bencana yang tidak dapat dibangun/diperbaiki karena bukan rumah milik dengan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan, padahal itu merupakan syarat agar rumahnya dapat dibangun/diperbaiki oleh Provinsi
- ✚ Keterbatasan pegawai yang menangani rumah tidak layak huni baik yang menjadi urusan maupun pencapaian indikator Gubernur (Kemiskinan Ekstrem), sehingga memperlambat kinerja

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

- ✚ Lebih awal dalam melakukan survey harga dan upah sebagai dasar dalam penyusunan HPS, agar lebih awal dalam melaksanakan probity audit
- ✚ Lebih awal dalam melaksanakan permohonan usulan probity audit dilaksanakan mulai Januari, sehingga laporan hasil probity audit bisa diterima bulan Maret atau April tahun berjalan

- ✚ Lebih awal dalam melaksanakan verifikasi penerima bantuan pembangunan rumah korban bencana, sebaiknya dilakukan di bulan Mei tahun berjalan
- ✚ Lebih cermat dalam Menyusun Data (*By Name By Address*) penerima rumah layak huni baik bagi korban bencana maupun kemiskinan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni telah disusun dan ditetapkan.
- ✚ Lebih cermat dalam perencanaan penganggaran untuk bantuan pembangunan/peningkatan rumah layak huni dengan penerima layanan masyarakat kemiskinan ekstrim
- ✚ Akan dilaksanakan pelatihan tukang baik tukang cetak Panel RISHA maupun Tukang Erection dengan tenaga ahli dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementrian PUPR dari Bandung. Bagi yang mengikuti pelatihan akan diberikan sertifikat dan menjadi tukang di Workshop yang dimiliki oleh Dinas Perkim Provinsi Banten

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas dengan indikator programnya adalah **Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman**

1) Kegiatan pengampu program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas adalah:

Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan target kinerja sebesar 100,00%, terealisasi sebesar 99,59%.

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

- (5) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
- Menyusun perencanaan :
1. Kajian Deliniasi PSU Permukiman WKP III Provinsi Banten
 2. Perencanaan PSU Permukiman
 3. Perencanaan PSU Permukiman Di Kabupaten Pandeglang

4. Perencanaan PSU Permukiman Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Pandeglang Dan Kabupaten Serang
 5. SID PSU Permukiman Di Kabupaten Lebak 1
 6. SID PSU Permukiman Di Kabupaten Lebak 2
 7. SID PSU Permukiman Di Kabupaten Pandeglang 1
 8. SID PSU Permukiman Di Kabupaten Pandeglang 2
 9. SID PSU Permukiman Di Kabupaten Serang 1
 10. SID PSU Permukiman Di Kabupaten Serang 2
 11. SID PSU Permukiman Di Kabupaten Tangerang 1
 12. SID PSU Permukiman Di Kabupaten Tangerang 2
 13. SID PSU Permukiman Di Kabupaten Tangerang 3
 14. SID PSU permukiman di kabupaten tangerang 4
 15. SID PSU permukiman di kota serang dan cilegon
 16. SID PSU Permukiman Di Kota Tangerang 1
 17. SID PSU Permukiman Di Kota Tangerang 2
 18. SID PSU Permukiman Di Kota Tangerang Selatan 1
 19. SID PSU Permukiman Di Kota Tangerang Selatan 2
 20. Pemutakhiran Data PSU Permukiman Provinsi Banten
 21. Rapat Pengurusan Haki Sistem Informasi Pendataan Berbasis Online
 22. Rekon data PSU Permukiman Kabupaten Lebak. Kabupaten Pandeglang, Kab. Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangsel
 23. Rapat Rekon Data PSU Permukiman Tahun 2024 Di WKP 1, WKP 2, WKP 3
- (6) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman, Target belum tercapai, target kinerja perubahan sebanyak 1619 Lokasi sedangkan realisasi 1610 lokasi. Namun terdapat 9 lokasi yang tidak dapat

dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya kesalahan input lokasi ke dalam aplikasi SIPD

- (7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman, Target telah tercapai, optimalisasi anggaran sehingga adanya pengurangan target kinerja, dimana target kinerja murni sebanyak 254 Laporan sedangkan target kinerja perubahan sebanyak 242 Laporan.

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

- ✚ Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
- ✚ Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- ✚ Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja
- ✚ Tersedianya data Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Provinsi Banten

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

- ✚ Realisasi Program Kawasan Permukiman sampai dengan bulan Desember telah tercapai sebesar 99,44%, namun pekerjaan tidak sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan karena adanya perubahan mekanisme pengadaan dari pengadaan langsung menjadi pengadaan e purchasing e Katalog

- ✚ Usulan lokasi pekerjaan baik dari kab/kota, pemerintah Desa maupun masyarakat disampaikan ke Dinas Perkim Provinsi Banten selanjutnya diverifikasi, dilaksanakan bersamaam pada tahun berkenaan
- ✚ Hasil verifikasi selanjutnya dilaksanakan pekerjaan fisiknya, karena semua prosesnya dilaksanakan pada tahun berkenaan dimana dibatasi waktu sehingga menyebabkan adanya kesalahan penulisan lokasi dimana terdapat lokasi yang tidak ditemukan atau overlap

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

- ✚ Berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa pada awal pelaksanaan pekerjaan agar diketahui adanya pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Provinsi untuk menghindari adanya pekerjaan Overlapping
- ✚ Lebih cermat dalam menyusun Dokumen Rencana Kegiatan, baik dalam merencanakan penganggaran dan lokasi pekerjaan
- ✚ Lebih intensif dalam berkonsultasi dengan pimpinan dan Perangkat Daerah yang membidangi pengadaan barang/jasa dalam hal metode pengadaan yang akan digunakan, sehingga bisa mempersiapkan Lebih awal dan lebih teliti mempersiapkan dokumen sebagai bahan pengadaan
- ✚ Akan segera mempersiapkan dokumen lelang, terutama dokumen HPS, KAK, RAB dan Surat Pengantar dari Kepala Dinas lebih awal atau sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan
- ✚ Lebih awal dalam melakukan survey harga dan upah sebagai dasar dalam penyusunan HPS

3. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan indikator programnya adalah Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah

Kegiatan pengampu Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah:

Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah dengan target kinerja sebesar 1 Laporan, terealisasi sebesar 1 Laporan.

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah ini dibagi menjadi:

- 1) WKP I meliputi wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023, di Hotel Golden Tulip, Kota Tangerang





- 2) Rapat Koordinasi Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023, di Hotel Le Semar, Kota Serang





- 3) WKP II dan III meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023, di Hotel Forbis, Kabupaten Serang





4. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan indikator programnya adalah **Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah**

Kegiatan pengampu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah:

Kegiatan pengampu Program Program Penatagunaan Tanah adalah:

Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi dengan target kinerja sebesar 1 Dokumen, terealisasi sebesar 1 Dokumen.

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi terkait Pelaksanaan kegiatan sudah dibebankan kepada pihak pemohon (instansi yang melaksanakan pengadaan tanah), penetapan lokasi tersebut, antara lain:

1. perubahan trase ruas tol serpong balaraja
2. bendungan karian
3. jalan pakupatan-palima
4. tol tangerang-merak
5. tol CBK
6. Flyover Sudirman

Sedangkan penetapan lokasi yang sudah selesai adalah:

1. Tol Serbaraja - Penlok Selesai
2. Tol Tangerang-Merak (Perpanjangan Penlok Thp. II dan III selesai)
3. Tol Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran (Perpanjangan Penlok Selesai)
4. KAI (SK. Gub Kerohiman - Selesai)
5. Tol Serang - Panimbang (Perpanjangan Penlok - Selesai)

Faktor Pendorong :

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Realisasi Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum berdasarkan perencanaan dan penganggaran Program dan Kegiatan telah dilaksanakan Rapat koordinasi bersama Tim persiapan capaiannya 100%

Solusi :

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran. Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Lebih intensif dalam berkonsultasi dengan pimpinan dan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah dalam melaksanakan pra pendataan awal sebagai bahan pleno pendataan awal dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan serta dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena pengadaan tanah
 2. Lebih intensif dalam berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyampaikan terkait kewenangan Provinsi, agar memperjelas terkait kewenangan urusan pertanahan sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
-
5. **Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee** dengan indikator programnya adalah Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

Kegiatan pengampu Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee adalah:

Kegiatan Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 2 Dokumen, terealisasi sebesar 2 Dokumen.

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Rapat internal koordinasi terkait penetapan subyek dan obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Faktor Pendorong :

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Realisasi capaian Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar 100% dikarenakan sub kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi, hal ini

karena masih menjadi kewenangan Pusat (Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten Kota)

Solusi :

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran. Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Lebih intensif dalam berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyampaikan terkait kewenangan Provinsi, agar memperjelas terkait kewenangan urusan pertanahan sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. **Program Penatagunaan Tanah** dengan indikator programnya adalah **Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota.**

1) Kegiatan pengampu Program Program Penatagunaan Tanah adalah:

Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 2 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP terealisasi sebesar 2 Dokumen.

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

Rapat koordinasi internal terkait Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Faktor Pendorong :

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Realisasi Program Penatagunaan Tanah sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar 100% dikarenakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penggunaan Tanah belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi, hal ini karena masih menjadi kewenangan Pusat (Kanwil Kementrian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten Kota).

Solusi :

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran. Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Lebih intensif dalam berkoordinasi dengan Kementrian ATR/BPN dan Kementrian Dalam Negeri dalam menyampaikan terkait kewenangan Provinsi, agar memperjelas terkait kewenangan urusan pertanahan

sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Progres kegiatan yang dianggarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada APBD TA. 2023 mencapai target yang diharapkan. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat target pendapatan dan belanja.

Pada Anggaran Belanja, terdapat beberapa perubahan dalam nilai anggaran dalam Tahun Anggaran 2023. Yaitu :

1. Anggaran Belanja pada DPA Murni adalah sebesar Rp. 521.212.000.000,00. Dari jumlah anggaran belanja tersebut, Belanja Operasi sebesar Rp. 511.956.781.900,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 9.255.218.100,00. Dari total Anggaran Belanja Operasi, dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp. 15.582.050.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 496.374.731.900,00.
2. Anggaran Belanja pada DPA Perubahan adalah sebesar Rp. 486.032.196.600,00. Dari jumlah anggaran belanja tersebut, Belanja Operasi sebesar Rp. 483.360.206.404,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.671.990.196,00. Dari total Anggaran Belanja Operasi, dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp. 15.591.260.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 467.768.946.404,00.

Apabila dibandingkan anggaran dengan realisasi pencapaian target keuangan pada Tahun Anggaran 2023, dapat terlihat dalam matriks berikut :

Tabel 3.8
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Tahun Anggaran 2023

No.	NAMA BELANJA	DPA MURNI	DPA Perubahan	Realisasi	%
1	Pendapatan	77.250.000,00	77.250.000,00	104.980.000,00	135,90
2	Belanja Daerah	521.212.000.000,00	486.032.196.600,00	453.133.184.915,00	93,23
2.1	Belanja Operasi	511.956.781.900,00	483.360.206.404,00	450.880.557.415,00	93,28
2.1.1	Belanja Pegawai	15.582.050.000,00	15.591.260.000,00	14.791.502.573,00	94,87
2.1.2	Belanja Brg dan Jasa	467.768.946.404,00	467.768.946.404,00	436.089.054.842,00	93,23
2.2	Belanja Modal	9.255.218.100,00	2.671.990.196,00	2.252.627.500,00	84,31

Belanja Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 453.133.184.915,00 Dari pagu anggaran sebesar Rp. 486.032.196.600,00 Atau sebesar 93,23 %. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja Tahun Anggaran 2023 terutama terjadi pada pos Belanja Operasi dan Belanja Modal, yaitu belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

- a. Terdapatnya perubahan aturan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang harus disesuaikan sehingga mengakibatkan mundurnya pelaksanaan kegiatan;
- b. Terdapat Belanja yang tidak bisa diserap karena barang yang dibutuhkan tidak memenuhi persyaratan dalam aturan TKDN;
- c. Terjadinya faktor cuaca sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan;
- d. Permasalahan teknis pada kegiatan disebabkan keterbatasan pelaksana teknis;
- e. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan;
- f. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;

Realisasi Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 sebesar Rp. 453.133.184.915,00 Dari Pagu anggaran sebesar Rp. 486.032.196.600,00 atau sebesar 93,23 %. Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 450.880.557.415,00 dari Pagu anggaran Rp. 483.360.206.404,00 atau sebesar 93,28%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah.

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja pegawai yang dianggarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tambahan penghasilan serta Honorarium PNS. Realisasi Belanja pegawai TA. 2023 adalah sebesar Rp. 14.791.502.573,00 atau sebesar 94,87 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 15.591.260.000,00. Realisasi Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 4.130.781.348,00 dari anggaran Rp. 4.287.514.816,00 , Realisasi Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 10.090.206.225,00 dari anggaran sebesar Rp. 10.699.485.184,00 dan Realisasi Honorarium Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp. 570.515.000,00 Dari anggaran sebesar Rp. 604.260.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi belanja Barang dan Jasa TA. 2023 sebesar Rp. 436.089.054.842,00 atau 93,23 % dari anggaran sebesar Rp. 467.768.946.404,00. Jenis Belanja Langsung terdiri dari :

1. Belanja Barang
2. Belanja Jasa
3. Belanja Pemeliharaan
4. Belanja Perjalanan Dinas

1) Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Realisasi belanja Barang TA. 2023 sebesar Rp. 407.603.726.572,00 atau 94,36 % dari anggaran sebesar Rp. 431.981.369.353,00. Belanja barang terdiri dari Belanja barang pakai habis. Yaitu diantaranya :

1. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi, Realisasi belanja sebesar Rp. 14.855.130,00 atau 99,71 % dari anggaran sebesar Rp. 14.899.000,00;
2. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, Realisasi belanja sebesar Rp. 87.817.150,00 atau 97,02 % dari anggaran sebesar Rp. 90.510.600,00;
3. Belanja bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran, Realisasi belanja sebesar Rp. 4.900.000,00 atau 98,04 % dari anggaran sebesar Rp. 4.998.000,00;
4. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian, Realisasi belanja sebesar Rp. 3.792.037,00 atau 99,76 % dari anggaran sebesar Rp. 3.801.000,00;
5. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel, Realisasi belanja sebesar Rp. 11.882.500,00 atau 99,79 % dari anggaran sebesar Rp. 11.907.000,00;
6. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya, Realisasi belanja sebesar Rp. 7.369.512,00 atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 7.369.600,00;

7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Realisasi belanja sebesar Rp. 2.202.826.047,00 atau 86,17 % dari anggaran sebesar Rp. 2.556.450.145,00;
8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Realisasi belanja sebesar Rp. 267.121.300,00 atau 83,06 % dari anggaran sebesar Rp. 321.810.000,00;
9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Realisasi belanja sebesar Rp. 19.750.000,00 atau 13,01 % dari anggaran sebesar Rp. 151.818.000,00;
10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Realisasi belanja sebesar Rp. 27.227.900,00 atau 84,95 % dari anggaran sebesar Rp. 32.050.000,00;
11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Realisasi belanja sebesar Rp. 164.901.092,00 atau 97,99 % dari anggaran sebesar Rp. 168.276.500,00;
12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Realisasi belanja sebesar Rp. 122.953.471,00 atau 88,22 % dari anggaran sebesar Rp. 139.376.500,00;
13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Realisasi belanja sebesar Rp. 185.118.078,00 atau 92,98 % dari anggaran sebesar Rp. 199.087.000,00;
14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, Realisasi belanja sebesar Rp. 198.194.994,00 atau 99,54 % dari anggaran sebesar Rp. 199.109.000,00
15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Realisasi belanja sebesar Rp. 87.802.005,00 atau 96,82 % dari anggaran sebesar Rp. 90.682.500,00;

16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Realisasi belanja sebesar Rp. 195.465.200,00 atau 99,80 % dari anggaran sebesar Rp. 195.860.000,00;
17. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Realisasi belanja sebesar Rp. 105.433.325.797,00 atau 90,17 % dari anggaran sebesar Rp. 116.926.763.058,00;
18. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada pihak ketiga/ pihak lain, Realisasi belanja sebesar Rp. 297.714.990.837,00 atau 96,11 % dari anggaran sebesar Rp. 309.753.455.000,00;
19. Belanja Natura dan Pakan-Natura, Realisasi belanja sebesar Rp. 101.919.200,00 atau 99,30 % dari anggaran sebesar Rp. 102.642.200,00
20. Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Realisasi belanja sebesar Rp. 577.661.272,00 atau 69,19 % dari anggaran sebesar Rp. 834.893.250,00;
21. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Realisasi belanja sebesar Rp. 72.549.000,00 atau 99,93 % dari anggaran sebesar Rp. 72.600.000,00;
22. Belanja Pakaian Batik Tradisional, Realisasi belanja sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 37.611.000,00;
23. Belanja Pakaian Olahraga, Realisasi belanja sebesar Rp. 64.288.000,00 atau 98,00 % dari anggaran sebesar Rp. 65.500.000,00;

2) Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp.24.271.065.910,00 atau 82,53% dari anggaran sebesar Rp. 29.407.705.051,00. Belanja Jasa terdiri dari :

a) Belanja Jasa Kantor, Realisasi belanja sebesar Rp. 13.494.760.067,00 atau 77,01 % dari anggaran sebesar Rp. 17.523.554.000,00

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Realisasi belanja sebesar Rp. 1.265.200.000,00 atau 74,61 % dari anggaran sebesar Rp. 1.695.650.000,00;

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Realisasi belanja sebesar Rp. 104.550.000,00 atau 79,99 % dari anggaran sebesar Rp. 130.700.000,00;

(3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Realisasi belanja sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00;

(4) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Realisasi belanja sebesar Rp. 121.680.000,00 atau 14 % dari anggaran sebesar Rp. 869.022.000,00;

(5) Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Realisasi belanja sebesar Rp. 3.520.600.500,00 atau 89,91 % dari anggaran sebesar Rp. 3.915.541.800,00;

(6) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Realisasi belanja sebesar Rp. 2.666.817.000,00 atau 87,48 % dari anggaran sebesar Rp. 3.048.326.100,00;

- (7) Belanja Jasa Tenaga Ahli, Realisasi belanja sebesar Rp. 3.170.108.200,00 atau 61,95 % dari anggaran sebesar Rp. 5.116.804.200,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Realisasi belanja sebesar Rp. 99.195.000,00 atau 97,42 % dari anggaran sebesar Rp. 101.820.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Realisasi belanja sebesar Rp. 433.265.000,00 atau 98,72 % dari anggaran sebesar Rp. 438.900.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Supir, Realisasi belanja sebesar Rp. 147.210.000,00 atau 96,87 % dari anggaran sebesar Rp. 151.970.000,00;
- (11) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi, Realisasi belanja sebesar Rp. 82.870.750,00 atau 97,17 % dari anggaran sebesar Rp. 85.285.000,00;
- (12) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Realisasi belanja sebesar Rp. 419.315.000,00 atau 84,42 % dari anggaran sebesar Rp. 496.691.400,00;
- (13) Belanja Tagihan Listrik, Realisasi belanja sebesar Rp. 349.341.417,00 atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 349.345.600,00;
- (14) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Realisasi belanja sebesar Rp. 1.099.607.200,00 atau 99,20 % dari anggaran sebesar Rp. 1.108.497.900,00;
- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Realisasi belanja sebesar Rp. 225.054.456,00 atau 94,45 % dari anggaran sebesar Rp. 238.279.440,00

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Realisasi belanja sebesar Rp. 209.939.856,00 atau 94,40 % dari anggaran sebesar Rp. 222.384.000,00;
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Realisasi belanja sebesar Rp. 6.717.597,00 atau 95,09 % dari anggaran sebesar Rp. 7.064.640,00;
 - (3) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, Realisasi belanja sebesar Rp. 8.397.003,00 atau 95,09 % dari anggaran sebesar Rp. 8.830.800,00
- c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Realisasi belanja sebesar Rp. 291.308.637,00 atau 60 % dari anggaran sebesar Rp. 485.479.111,00;
- (1) Belanja Sewa Aggregate and Concrete Equipment, Realisasi belanja sebesar Rp. 70.263.000,00 atau 99,94 % dari anggaran sebesar Rp. 70.305.000,00;
 - (2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Realisasi belanja sebesar Rp. 46.867.500,00 atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 46.867.500,00;
 - (3) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Realisasi belanja sebesar Rp. 129.592.080,00 atau 56,84 % dari anggaran sebesar Rp. 228.000.000,00;
 - (4) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya, Realisasi belanja sebesar Rp. 38.392.257,00 atau 69,92 % dari anggaran sebesar Rp. 63.016.000,00;
 - (5) Belanja Sewa Mebel, Realisasi belanja sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari anggaran sebesar Rp. 69.541.611,00;

- (6) Belanja Sewa Alat Pendingin, Realisasi belanja sebesar Rp. 6.193.800,00 atau 79,93 % dari anggaran sebesar Rp 7.749.000,00;
- d) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Realisasi belanja sebesar Rp. 322.395.000,00 atau 99,88 % dari anggaran sebesar Rp. 322.770.000,00
- (1) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Realisasi belanja sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00;
- (2) Belanja Sewa Hotel, Realisasi belanja sebesar Rp. 317.395.000,00 atau 99,88 % dari anggaran sebesar Rp. 317.770.000,00
- e) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Realisasi belanja sebesar Rp. 4.880.786.424,00 atau 97,13 % dari anggaran sebesar Rp. 5.025.000.000,00
- (1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, Realisasi belanja sebesar Rp. 358.319.599,00 atau 99,53 % dari anggaran sebesar Rp. 360.000.000,00;
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung, Realisasi belanja sebesar Rp. 60.577.140,00 atau 96,92 % dari anggaran sebesar Rp. 62.500.000,00;
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior, Realisasi belanja sebesar Rp. 61.571.700,00 atau 98,51 % dari anggaran sebesar Rp. 62.500.000,00 ;
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya, Realisasi belanja sebesar Rp. 3.810.896.186,00 atau 96,72 % dari anggaran sebesar Rp. 3.940.000.000,00;

- (5) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan, Realisasi belanja sebesar Rp. 589.421.799,00 atau 98,24 % dari anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00
- f) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Realisasi belanja sebesar Rp. 5.056.761.326,00 atau 87,11% dari anggaran sebesar Rp. 5.805.122.500,00
- (1) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika, Realisasi belanja sebesar Rp. 99.202.000,00 atau 99,20 % dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00;
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei, Realisasi belanja sebesar Rp. 1.530.423.180,00 atau 99,38 % dari anggaran sebesar Rp. 1.540.000.000,00;
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik, Realisasi belanja sebesar Rp. 168.480.000,00 atau 99,11 % dari anggaran sebesar Rp. 170.000.000,00;
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen, Realisasi belanja sebesar Rp. 3.258.656.146,00 atau 81,57 % dari anggaran sebesar Rp. 3.995.122.500,00;
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus, Realisasi belanja sebesar Rp. 282.718.500,00 atau 95,83 % dari anggaran sebesar Rp. 295.025.700,00
- g) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Realisasi belanja sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00
- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Realisasi belanja sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00;

3) Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp. 1.795.265.700,00 atau 73,88 % dari anggaran sebesar Rp. 2.430.088.000,00

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Realisasi belanja sebesar Rp. 1.080.530.800,00 atau 63,43 % dari anggaran sebesar Rp. 1.703.434.000,00;

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa, Realisasi belanja sebesar Rp. 5.025.000,00 atau 96,49 % dari anggaran sebesar Rp. 5.207.600,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Realisasi belanja sebesar Rp. 690.636.100,00 atau 68,77 % dari anggaran sebesar Rp. 1.004.290.000,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Realisasi belanja sebesar Rp. 89.250.000,00 atau 83,10 % dari anggaran sebesar Rp. 107.400.000,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus, Realisasi belanja sebesar Rp. 179.288.700,00 atau 96,63 % dari anggaran sebesar Rp. 185.550.000,00;

(5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan), Realisasi belanja sebesar Rp. 12.815.400,00 atau 52,08 % dari anggaran sebesar Rp. 24.609.000,00;

(6) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Realisasi belanja sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp. 111.440.500,00;

(7) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih, Realisasi belanja

- sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari anggaran sebesar Rp. 9.894.400,00;
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Realisasi belanja sebesar Rp. 56.155.600,00 atau 98,50 % dari anggaran sebesar Rp. 57.011.200,00;
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Realisasi belanja sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari anggaran sebesar Rp. 12.040.300,00;
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio, Realisasi belanja sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari anggaran sebesar Rp. 26.037.500,00;
- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone, Realisasi belanja sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 203.500,00;
- (12) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer, Realisasi belanja sebesar Rp. 47.360.000,00 atau 29,65 % dari anggaran sebesar Rp. 159.750.000,00
- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Realisasi belanja sebesar Rp. 714.734.900,00 atau 98,36 % dari anggaran sebesar Rp. 726.654.000,00;
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, Realisasi belanja sebesar Rp. 714.734.900,00 atau 98,36 % dari anggaran sebesar Rp. 726.654.000,00;

4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 Realisasi belanja sebesar Rp. 2. 418.996.660,00 atau 61,24 % dari anggaran sebesar Rp. 3.949.784.000,00;

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Realisasi belanja sebesar Rp. 2.418.996.660,00 atau 61,24 % dari anggaran sebesar Rp. 3.949.784.000,00;

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Realisasi belanja sebesar Rp. 91.664.500,00 atau 35,53 % dari anggaran sebesar Rp. 257.967.000,00;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Realisasi belanja sebesar Rp. 2.235.060.180,00 atau 63,59 % dari anggaran sebesar Rp. 3.514.800.000,00;

(3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Realisasi belanja sebesar Rp. 52.350.000,00 atau 40,82 % dari anggaran sebesar Rp. 128.250.000,00;

(4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, Realisasi belanja sebesar Rp. 39.921.980,00 atau 81,86 % dari anggaran sebesar Rp. 48.757.000,00;

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.252.627.500,00 atau sebesar 84,31 % dari Pagu anggaran Rp. 2.671.990.196,00. Belanja Modal Tahun 2023 terdiri dari;

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Realisasi belanja sebesar Rp. 2.178.141.300,00 atau 83,90,00 % dari anggaran sebesar Rp. 2.596.031.300,00;

- 1) Belanja Modal Mesin Bor, Realisasi belanja sebesar Rp5.971.800,00 atau 98,44 % dari anggaran sebesar Rp. 6.066.200,00;
 - 2) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Khusus, Realisasi belanja sebesar Rp. 1.695.500.000,00 atau 90,20 % dari anggaran sebesar Rp. 1.879.746.000,00;
 - 3) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor, Realisasi belanja sebesar Rp. 29.910.000,00 atau 82,82 % dari anggaran sebesar Rp. 36.116.100,00;
 - 4) Belanja Modal Alat Pendingin, Realisasi belanja sebesar Rp. 49.000.000,00 atau 96,51 % dari anggaran sebesar Rp. 50.773.100,00;
 - 5) Belanja Modal Personal Computer, Realisasi belanja sebesar Rp. 159.250.000,00 atau 45,27 % dari anggaran sebesar Rp. 351.745.700,00;
 - 6) Belanja Modal Peralatan Personal Computer, Realisasi belanja sebesar Rp. 48.200.000,00 atau 63,96 % dari anggaran sebesar Rp. 75.363.200,00;
 - 7) Belanja Modal Unit Peralatan Proses/ Produksi Lainnya, Realisasi belanja sebesar Rp. 190.309.500,00 atau 97,36 % dari anggaran sebesar Rp. 196.221.000,00
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Realisasi belanja sebesar Rp. 74.486.200,00 atau 98,06 % dari anggaran sebesar Rp. 75.958.896,00;
- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Realisasi belanja sebesar Rp. 74.486.200,00 atau 98,06 % dari anggaran sebesar Rp. 75.958.896,00;

Tabel 3.9 Realisasi Belanja TA. 2023

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	483.360.206.404,00	450.880.557.415,00	93,28
Belanja Pegawai	15.591.260.000,00	453.135.588.915,00	93,23
Belanja Barang dan Jasa	467.768.946.404,00	436.089.054.842,00	93,23
Belanja Hibah	0,00	14.791.502.573,00	94,87
BELANJA MODAL	372.672.075.140,00	436.091.458.842,00	93,23
Belanja Modal Tanah	0,00	2.252.627.500,00	84,31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.596.031.300,00	104.980.000,00	135,90
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.958.896,00	453.135.588.915,00	93,23
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	450.882.961.415,00	93,28
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	14.791.502.573,00	94,87
JUMLAH BELANJA DAERAH	486.032.196.600,00	453.133.184.915,00	93,22

Efisiensi anggaran program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \left(100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%\right) \\
 &= \left(100\% - \frac{453.133.184.915}{486.032.196.600} \times 100\%\right) \\
 &= (100\% - 93,22\%) \\
 &= 6,78\%
 \end{aligned}$$

Terdapat 12 kegiatan yang Realisasi kegiatan dibawah 90%, yaitu :

1. Realisasi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TA. 2023 yang terserap sebesar Rp. 1.393.036.042,00 atau 89,67 % dari anggaran sebesar Rp. 1.553.470.000,00. Hal ini disebabkan terdapat efisiensi belanja dan rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan pertimbangan kebutuhan, waktu dan penganggaran. Sehingga penyerapan disesuaikan dengan yang dimungkinkan untuk pelaksanaan.

2. Realisasi kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah TA. 2023 yang terserap sebesar Rp. 220.039.297,00 atau 51,62 % dari anggaran sebesar Rp. 426.288.400,00 hal ini disebabkan rasionalisasi pelaksanaan pekerjaan sehingga terdapat efisiensi belanja dan terdapat anggaran tidak digunakan yaitu terdapat Belanja barang dan jasa yang penyerapannya sesuai dengan kebutuhannya.
3. Realisasi kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah TA. 2023 yang terserap sebesar Rp. 348.843.200,00 atau 72,29 % dari anggaran sebesar Rp. 482.584.400,00. Hal ini disebabkan Asumsi pelaksanaan penyerapan tidak sesuai dengan waktu realisasinya dan rasionalisasi pelaksanaan pekerjaan. Dan terdapat juga Belanja barang dan jasa yang penyerapannya sesuai dengan kebutuhannya serta dinilai perencanaan penganggaran terlalu besar.
4. Realisasi kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah TA. 2023 yang terserap sebesar Rp. 3.006.558.015,00 atau 87,28% dari anggaran sebesar Rp. 3.444.714.228,00 hal ini disebabkan terdapat efisiensi belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan. Serta rasionalisasi pelaksanaan kegiatan .
5. Realisasi kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah TA. 2023 yang terserap sebesar Rp. 1.991.899.950,00 atau 81,96% dari anggaran sebesar Rp. 2.430.344.100,00 hal ini disebabkan terdapat efisiensi belanja dan rasionalisasi pelaksanaan/ sesuai kebutuhan. Dan juga terdapat barang yang terkendala aturan TKDN yang tidak sesuai dengan rencana.
6. Realisasi kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah TA. 2023 yang terserap sebesar Rp. 1.971.455.440,00 atau 74,11% dari anggaran sebesar Rp. 2.660.032.600,00 hal ini disebabkan terdapat efisiensi belanja dan

rasionalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan barang.

7. Realisasi kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi TA. 2023 yang terserap sebesar Rp. 23.980.512.057,00 atau 88,56% dari anggaran sebesar Rp. 27.077.512.900,00 hal ini disebabkan terdapat efisiensi belanja dan rasionalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai waktu dan kebutuhan. Sisa terbesar dari belanja Tenaga ahli pekerjaan RISHA yang penganggarnya dari Dana Insentif Daerah (DID). Belanja ini tidak bisa diserap karena waktu yang tidak mencukupi.
8. Realisasi kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha TA. 2023 yang terserap sebesar Rp. 1.949.810.121,00 atau 82,65% dari anggaran sebesar Rp. 2.359.255.350,00 hal ini disebabkan terdapat efisiensi belanja dan rasionalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan waktu serta diasumsikan nilai perencanaan/ penganggaran terlalu besar.
9. Realisasi kegiatan Sertifikasi dan Registerasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah TA. 2023 yang terserap sebesar Rp. 384.804.974,00 atau 79,87% dari anggaran sebesar Rp. 481.769.600,00 hal ini disebabkan terdapat efisiensi belanja dan rasionalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan yang dinilai perencanaan/ penganggaran terlalu besar.
10. Realisasi kegiatan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum diwilayah Provinsi TA. 2023 yang terserap sebesar Rp. 31.900.000,00 atau 36,06% dari anggaran sebesar Rp. 88.464.100,00 hal ini disebabkan Rencana Penyusunan Anggaran Tidak Sesuai

Peruntukannya, Nomenkelatur anggaran Makan Minum belum sesuai dengan Tahapan Persiapan Penetapan Lokasi dan instansi yang memerlukan Tanah Lebih Banyak dari Anggaran Pemerintah Pusat dan Swasta DPRD Pemerintah Provinsi Banten.

11. Realisasi kegiatan Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah lintas daerah Kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi TA. 2023 yang terserap sebesar Rp. 38.263.945,00 atau 21,63 % dari anggaran sebesar Rp. 176.928.200,00 hal ini disebabkan Belum cukupnya Data dan Informasi dari Instansi Pengusul (BPN) untuk Penetapan Redistribusi, dan Belum cukupnya Data dan Informasi dari Instansi Pengusul (BPN) untuk Pemanfaatan Redistribusi.
12. Realisasi kegiatan Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/ Kota dal 1 (satu) daerah Provinsi TA. 2023 yang terserap sebesar Rp. 34.645.000,00 atau 19,85% dari anggaran sebesar Rp. 174.555.500,00 hal ini disebabkan Belum cukupnya Data dan Informasi dari Stakeholder untuk Perencanaan Penggunaan Tanah dan belum adanya sosialisasi terhadap penerapan aturan/regulasi yang ada , dan Belum cukupnya Data dan Informasi dari Stakeholder untuk Konsolidasi Tanah dan belum adanya sosialisasi terhadap penerapan aturan/regulasi yang ada.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan dapat disimpulkan bahwa secara umum telah dapat memenuhi sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dari 7 (tujuh) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) Sub Kegiatan pada APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023.

Capaian kinerja sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan rata-rata mencapai nilai sangat baik sebesar 100%, sebagaimana tabel berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	70-80		
2	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	Luasan permukiman kumuh	219 Ha	305,00 Ha	139,27%
3		Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	60,83%	77,55%	127,49%

4		Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	91,73%	99,44%	108,41%
5		Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	100%	100%	100%

4.2 Saran-saran rekomendasi

Seluruh capaian kinerja yang telah dicapai, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2023, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja yang akan datang sebagai berikut:

- Lebih meningkatkan koordinasi antar bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten maupun dengan pemerintah dan kabupaten/kota
- Mengoptimalkan potensi yang ada baik berupa SDM, Anggaran maupun kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut dapat lebih efektif dan efisien mewujudkan tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan
- Lebih memperhatikan aspek keserasian, keselarasan, keseimbangan sesuai pola strategik, dalam implementasi rencana kinerja ke depan sehingga terdapat keseimbangan yang wajar atas pencapaian dari masing-masing tujuan strategik. Hal ini penting guna mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang diharapkan.
- Lebih banyak melakukan sosialisasi kinerja kepada semua pejabat struktural dan staf sehingga pemahaman dan implementasi kinerja dapat berjalan dengan baik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

AL MUKTABAR

MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Pembangunan Gedung, Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi.	Persentase Cakupan Pembangunan Gedung, Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi	Persen	100
3	Meningkatnya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan	Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	19,76
4	Meningkatnya Kualitas Rumah, Penataan Kawasan Permukiman yang Layak dan Tata Kelola Pertanahan	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	40
		Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	60,81
		Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	277,63
		Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.250.000
4.1.02	Retribusi Daerah	77.250.000
	TOTAL PENDAPATAN	77.250.000

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	242.480.150.000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	46.070.000.000
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.830.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	450.000.000
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.500.000.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	63.750.000.000
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	124.880.150.000
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.712.000.000

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.387.050.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	21.500.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	80.798.000.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	379.526.950.000
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	500.000.000
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	500.000.000
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	100.000.000
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	200.000.000
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000
	TOTAL BELANJA	763.692.150.000

Pj. GUBERNUR BANTEN,

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,**



AL MUKTABAR



MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. (0254) 7039946, Fax (0254) 267041

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, Februari 2024

Pt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700320 200112 1 002